

SKRIPSI

**MANAJEMEN PERKOTAAN BERBASIS *E-GOVERNMENT* PADA
PROGRAM *SMART CITY* DI KOTA MAKASSAR**



MUH. SULFAN ARIES

Nomor Stambuk : 10564 01787 13

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**MANAJEMEN PERKOTAAN BERBASIS *E-GOVERNMENT* PADA
PROGRAM *SMART CITY* DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

MUH. SULFAN ARIES

Nomor Stambuk: 10564 01787 13

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Manajemen Perkotaan Berbasis *E-Government* Pada
Program *Smart City* di Kota Makassar

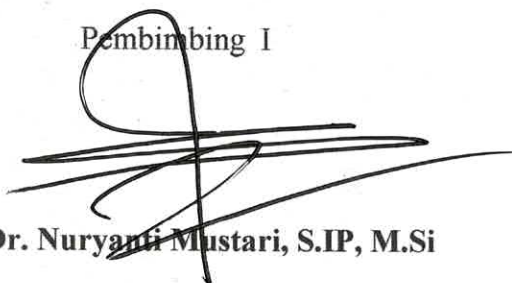
Nama Mahasiswa : Muh. Sulfan Aries

Nomor Stambuk : 105640 1787 13

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

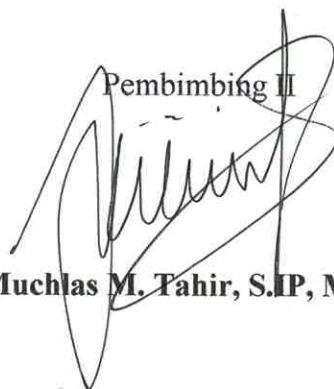
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

Pembimbing II



Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si

Mengetahui,

Dekan

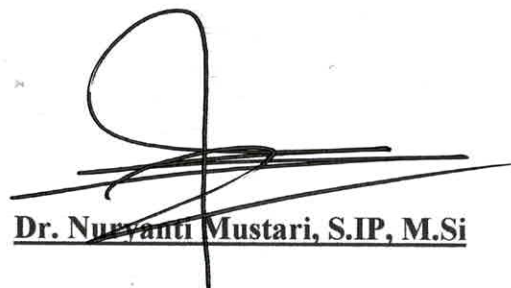
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ikhwan Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1342/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

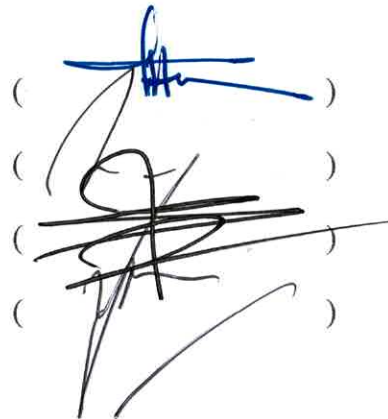
Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PENGUJI

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
4. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Sulfan Aries

Nomor Satmbuk : 105640 1787 13

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 02 Mei 2017

Yang Menyatakan,

Muh. Sulfan Aries

ABSTRAK

MUH. SULFAN ARIES 2018. Manajemen Perkotaan Berbasis *E-Government* Pada Program *Smart City* Di Kota Makassar (Di Bimbing Oleh Nuryanti Mustari Dan Muchlas M. Tahir).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Manajemen Perkotaan Berbasis *E-Government* Pada Program *Smart City* Kota Makassar dan faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam Manajemen Perkotaan Berbasis *E-Government* Pada Program *Smart City* Di Kota Makassar. Jenis dan tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa: Observasi, Dokumentasi dan dikembangkan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Perkotaan Berbasis *E-Government* Pada Program *Smart City* Di Kota Makassar sudah sesuai dengan visi-misi pembangunan Pemerintah Kota Makassar, dilihat dari indikator manajemen perkotaan menurut George R. Terry yaitu (1). Perencanaan pemerintah Kota Makassar membuat pedoman perencanaan yang legal, efisien dan terjangkau oleh pelaksana, pedoman tersebut mencakup peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No. 5 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2019 serta pedoman perencanaan yang bersifat operasional atau petunjuk teknis yaitu *masterplan smart city* Kota Makassar yang acuan dan pedoman rencana kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar (SKPD). (2). Pengorganisasian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui dengan mengeluarkan SK Pembentukan Tim Pelaksana Teknis *Sombere' dan Smart City*. (3). Pelaksanaan untuk mewujudkan Makassar sebagai *Smart City* dibutuhkan sebuah program kerja maka dari itu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mempunyai program kerja sesuai tugas, fungsi dan kewenangan agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. (4). Pengendalian dalam pelaksanaan program *smart city* Kota Makassar dilakukan oleh setiap kepala SKPD tersebut baik dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan lainnya kemudian akan kembali ditindak lanjuti oleh Walikota Makassar untuk mengevaluasi apa yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu : faktor pendukung adalah (1).Komitmen Pemerintah Kota Makassar, (2). Regulasi, serta (3). Kepemimpinan sedangkan faktor penghambat adalah (1). Sumber Daya Manusia, dan (2). Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),serta (3). Anggaran

Kata Kunci: Manajemen Perkotaan, *E-Government*, *Smart City*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” **Manajemen Perkotaan Berbasis *E-Government* Pada Program *Smart City* Di Kota Makassar**”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si** selaku Pembimbing I dan bapak **Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Selain itu penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim , SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam urusan administrasi dikampus.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan dorongan dan motivasi dalam kelancaran penulisan skripsi.
6. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dan seluruh jajarannya meluangkan waktunya memberikan informasi dan data selama penelitian.
7. Pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar yang telah memberikan data informasi selama penulis melaksanakan penelitian
8. Pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Makassar yang telah memberikan informasi dan data selama penelitian.
9. Teruntuk yang paling kusayangi kedua orang tua saya yakni Aries Karim dan Nuraeni yang senantiasa memberikan dukungan moril dan selalu mendoakan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran kepada anaknya selama menempuh studi di bangku kuliah.
10. Untuk saudara dan saudari saya yaitu Subhan, Kiki, Mimi, Subran, Mila dan Nana yang telah memberikan semangat dan doa yang tulus kepada penulis.
11. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus untuk kelas B Ilmu Pemerintahan

angkatan 2013 yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat di selesaikan oleh penulis.

12. Buat teman seangkatan 013 Ilmu Administrasi yaitu Puput, Juna, Ipha, Hendrawan dan teman-teman lainnya yang tidak disebut satu persatu memberikan semangat dan menghibur kepada saya selama penulisan skripsi.
13. Untuk keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fisipol Unismuh Makassar telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi.
14. Buat teman-teman KKP angkatan 13 khususnya Kelurahan Karunrung yang banyak memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan kita semua, Amin.

Makassar, 2018

Muh. Sulfan Aries

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Ilmiah	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Perkotaan	8
B. <i>E-Government</i>	18
C. <i>Smart City</i>	25
D. Kerangka Pikir.....	29
E. Fokus Penelitian	31
F. Deskripsi Fokus Penelitian	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	34
C. Sumber Data	35
D. Informan Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	38
G. Teknik Keabsahan Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41
B. Manajemen Perkotaan Berbasis <i>E-Government</i> Pada Program <i>Smart City</i> Di Kota Makassar	66
a. Perencanaan (<i>Planning</i>).....	71
b. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	75

c. Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)	78
d. Pengendalian (<i>Controlling</i>)	83
C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Manajemen Perkotaan Berbasis <i>E-Government</i> Pada Program <i>Smart City</i> Di Kota Makassar	86
a. Faktor Pendukung	
1. Komitmen Pemerintah Kota Makassar	86
2. Regulasi	88
3. Kepemimpinan	90
b. Faktor Penghambat	
1. Sumber Daya Manusia (SDM)	92
2. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	94
3. Anggaran	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan.....	36
Tabel 1.2 Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2015.....	43
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kota Makassar.....	47
Tabel 1.4 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Makassar.....	48
Tabel 1.5 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Adanya Program <i>Smart City</i> di Kota Makassar.....	69
Tabel 1.6 Rencana Induk <i>Sombere' & Smart City</i> Kota Makassar.....	71
Tabel 1.7 Program kerja yang sudah terlaksana dan belum terlaksana dalam mendukung penyelenggaraan <i>Sombere' & Smart City</i> Kota Makassar.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	31
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen perkotaan dalam pembangunan perkotaan di Indonesia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari proses perencanaan yang semakin berkembang sejalan dengan perkembangan pembangunan di Indonesia pada umumnya. Perkembangan tersebut dicirikan, antara lain, oleh perubahan kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekaligus disertai tekanan-tekanan akibat transformasi sosial ekonomi yang terjadi dan berpengaruh besar dalam pembangunan perkotaan.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka teknologi informasi juga terus meningkat, kebutuhan masyarakat akan keterbukaan dan akses yang lebih cepat merupakan suatu kebutuhan yang tak dapat dipisahkan lagi. Pelayanan yang prima dan cepat merupakan tuntutan dari masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena arus globalisasi dan informasi yang bergerak begitu cepat. Pemerintah dalam hal ini merupakan penyedia jasa publik terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai konsep akan pelayanan publik terus dikembangkan (Nurwan, 2015).

Manajemen Perkotaan merupakan suatu upaya proses pelaksanaan rencana kota untuk mencapai sasaran pembangunan kota secara efisien dan efektif. *E-Government* adalah sebuah cara bagi pemerintahan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahan akses

untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi birokrasi pemerintah. Dimana dalam pelaksanaan *e-government* memiliki enam asas dalam pelaksanaannya yaitu Transparan, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan hak dan Keseimbangan hak. *Smart City* adalah suatu konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di kota lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Smart City ini merupakan agenda global dalam rangka meningkatkan hubungan-hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan secara efektif dan efisien. Melalui *Smart City* ini pula maka tujuan-tujuan pembangunan perkotaan dapat dilaksanakan dengan sistematis dan bertahap dengan perspektif jangka panjang. *Smart City* memiliki enam dimensi yang dijadikan sebagai indikator dalam mencapai keberhasilan, yaitu : *Smart Government* (Pemerintah Pintar), *Smart Economy* (Ekonomi Pintar), *Smart Living* (Hidup Pintar), *Smart Environment* (Lingkungan Pintar), *Smart People* (Masyarakat Pintar), *Smart Mobility* (Mobilitas Pintar).

Kota-kota di Indonesia yang telah menerapkan *Smart City*, contoh pada Kota Surabaya telah meningkatkan ruang terbuka hijau pada pemugaran taman bungkul di Jalan Raya Darmo dengan konsep *all-in-one entertainment park*, taman di Bundaran Dolog, taman buah Undaan, serta taman di Bawean, dan di beberapa

tempat lainnya yang dulunya mati sekarang tiap malam dipenuhi dengan warga Surabaya. Selain itu membangun jalur pedestrian dengan konsep modern di sepanjang jalan Basuki Rahmat yang kemudian dilanjutkan hingga jalan Tunjungan, Blauran, dan Panglima Sudirman. *Smart Governance*, meliputi antara lain keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, sistem administrasi kependudukan, sistem administrasi perizinan, partisipasi warga dan sistem monitoring area publik. *Smart Living* antara lain tentang penerimaan murid baru *online*, SIM sekolah *online*, portal pariwisata, CCTV pemantau lalu lintas dan fasilitas wifi gratis di tempat publik. Sementara *Smart Environment* diantaranya meliputi sistem peringatan dini bencana, sistem pengolahan sampah berbasis teknologi informasi dan sistem monitoring air berbasis IT sehingga Kota Surabaya dapat memenangkan ajang *Smart City Award*. (Angelia, 2016)

Sedang pada Kota Bandung, Terdapat 5000 Wifi di setiap ruang publik. Pengadaan layanan akses internet di ruang terbuka publik, aplikasi *Panic Button* yang bekerja sama dengan kepolisian yang berfokus pada masalah keamanan, pelayanan publik lewat jaringan sosial media seperti *Twitter*, setiap dinas memiliki data digital, *smart government* dengan meng-upgrade sistem di pemerintahan dari *paper* ke *paperless* dengan sistem informasi yang *user friendly*, dan Bandung akan punya kota pintar yang akan dinamai Bandung Technopolis seluas 400 hektar, Kota Pintar di Gede Bage itu nantinya akan menjadi prototipe penerapan *Smart City* di Indonesia (Gunawan, 2015) .

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor

54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bahwa diawal kepemimpinan kepala daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2014 memuat Visi Pemerintah Kota Makassar yang dijabarkan dalam tiga misi yakni merekonstruksi nasib rakyat, merestorasi tata ruang kota, dan mereformasi tata pemerintahan menjadi layanan publik kelas dunia bebas korupsi. (Tenriawaru, 2015)

Smart City dianggap mampu menyelesaikan permasalahan kemacetan, persampahan, maupun peningkatan lingkungan yang baik. Akan tetapi pelaksanaan *Smart City* di Indonesia khususnya Kota Makassar tentunya bukan tidak memiliki masalah dan tantangan, masalah yang dimiliki yaitu kurangnya pasokan energi yang ada. Hal tersebut berdampak terhadap prasarana teknologi informasi yang sampai saat ini masih terbatas, karena untuk memiliki sarana sistem informasi/teknologi yang baik harus dibarengi dengan pasokan energi yang cukup. Kendala lain yang dimiliki adalah pendanaan dalam mewujudkan *Smart City* cukup besar. Mulai dari penyediaan teknologi, perbaikan infrastruktur dan suprastruktur, Selain itu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mencapai *Smart City* adalah pola pikir masyarakat akan kesadaran kepedulian lingkungan, pemanfaatan teknologi secara maksimal dan pola hidup “Cerdas” yang masih kurang.

Masa kepemimpinan Dany Pomanto dan Syamsul Rizal mengangkat Visi **“Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua”**. Untuk mencapai hal tersebut Konsep *Smart City* atau Kota Pintar digunakan dalam rangka mewujudkan Makassar yang bernuansa Kota Dunia. Kota Makassar berada pada jalur perdagangan, sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi di Indonesia Timur yang berpotensi mewujudkan *Smart City* secara efektif karena dengan lokasi yang strategis tersebut menuntut masyarakatnya untuk mengenal teknologi dengan cepat (Nurwan, 2015). Program *Smart City* di Kota Makassar menekankan pada berbagai layanan digital (aplikasi sistem berbasis *web*) dalam menunjang program pemerintah Kota Makassar dan mendekatkan dan meningkatkan pelayanan ke masyarakat secara *online*.

Mengembangkan *smart city* di Kota Makassar bukan dengan menjadikan IT dan solusi teknologi sebagai tujuan akhir tetapi lebih fokus kepada inovasi dan terobosan untuk menyelesaikan masalah prioritas dan atau mengembangkan sektor unggulan daerah, berbasis data yang terintegrasi, dan kolaboratif antar sektor. Pembangunan berbasis *smart city* secara simultan harus bisa menghasilkan *smart people* dan *smart society*. Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis *smart city* telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Pembangunan *smart city* tidak sekedar mengedepankan efisiensi dan birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga membangun masyarakat

dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau *enabler*. (Jusman, 2017)

Penerapan *Smart City* di Kota Makassar tidak terlepas dari cita-cita untuk mewujudkan Makassar sebagai kota dunia. Hal ini dapat dicapai ketika transparansi kebijakan pemerintah dapat diakses oleh masyarakat hingga berbagai masalah sosial dapat diatasi. Oleh karena itu, penerapan *Smart City* di Kota Makassar perlu kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat maupun pengusaha sebagai pihak perencana, penggerak dan pelaksana konsep *Smart City*. Hal tersebut bertujuan agar *Smart City* di Kota Makassar dapat dirasakan manfaatnya secara permanen, bukan hanya dalam rentang waktu lima tahun, namun juga di masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat sebuah judul penelitian **“Manajemen Perkotaan Berbasis *E-Government* Pada Program *Smart City* Di Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan yang dibahas yaitu:

1. Bagaimana manajemen perkotaan berbasis *e-government* pada program *Smart City* di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung manajemen perkotaan berbasis *e-government* pada program *Smart City* di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen perkotaan berbasis *e-government* pada program *Smart City* di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung manajemen perkotaan berbasis *e-government* pada program *Smart City* di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada :

1. Manfaat secara teoritis, yaitu sebagai bahan literatur dan hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan kepada pembaca khususnya pada kajian ilmu pemerintahan.
2. Manfaat secara praktis, yaitu sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam kajian penelitian berikutnya mengenai manajemen perkotaan pada program *Smart City* di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Perkotaan

Manajemen adalah suatu proses pengaturan atau ketatalaksanaan untuk mencapai suatu tujuan dengan melibatkan orang lain. Fungsi manajemen dirumuskan George R. Terry ada 4 yaitu, perencanaan (planning), pengorganisasian (Organizing), pelaksanaan (Actuating), dan pengendalian (Controlling). Semua proses tersebut dilakukan dalam rangka mengemban tugas pokok organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Sadyohutomo, 2009:2).

Manajemen menurut Abdurrahmat Fathonin dalam Fawahid (2016:4) adalah proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan yang dimulai dari penentuan tujuan sampai pengawasan dimasing- masing bidang digunakan baik itu ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti serta berurutan dalam rangka berusaha mencapai sasaran yang ditetapkan semula.

Menurut Siswanto dalam Fawahid (2016:4) mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di sistematiskan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat di simpulkan manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain.

Dengan demikian manajemen adalah proses kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi.

Menurut Prajudi Atmolah Sudirdjo dalam Fawahid (2016:4) fungsi manajemen meliputi :

1. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan oleh karenanya lebih tepat bila perencanaan dirumuskan sebagai penetapan tujuan, kebijakan, prosedur dan program dari suatu organisasi.
2. Pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.
3. *Directing* adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.
4. Pengawasan, dalam pelaksanaan tugas pengawasan untuk mempermudah pelaksanaannya dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjektifkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut : menetapkan alat pengukur (standar), mengandalkan penilaian (evaluation), mengadakan tindakan perbaikan (*corective action*)

Kota merupakan sebuah sistem yaitu sistem terbuka, baik fisik maupun sosial ekonomi, bersifat tidak statis dan dinamis atau bersifat sementara. Dalam perkembangannya, kota sukar untuk di kontrol dan sewaktu-waktu dapat menjadi tidak beraturan. Kota merupakan suatu wilayah berkembangnya kegiatan sosial, budaya dan ekonomi perkotaan yang tidak berstatus sebagai kota administratif atau kotamadya. Zoe'raini Djamal Irwan (dalam Kabupung, 2012:38) Aktifitas dan perkembangan kota mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. Beliau mengemukakan pengertian kota sebagai berikut :

1. Suatu areal dimana terdapat atau menjadi pemusatan penduduk dengan kegiatannya dan merupakan tempat konsentrasi penduduk dan pusat aktivitas perekonomian (seperti industri, perdagangan dan jasa)
2. Kota merupakan sebuah sistem, baik secara fisik maupun sosial ekonomi, bersifat tidak statis yang sewaktu-waktu dapat menjadi tidak beraturan dan susah dikontrol
3. Mempunyai pengaruh terhadap lingkungan fisik seperti iklim dan sejauh mana pengaruh itu sangat tergantung kepada perencanaannya.

Secara rinci digambarkan bahwa kota meliputi konsentrasi daerah pemukiman berpenduduk cukup besar dan kepadatan relatif tinggi dimana kegiatan penduduk didominasi oleh kegiatan nonpertanian, seperti industri, perdagangan dan jasa, baik di bidang keuangan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Pembangunan ruang perkotaan bertujuan untuk : memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat berusaha dan tempat tinggal, baik dalam kuantitas

maupun kualitas dan memenuhi kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberi rasa aman, damai, tenteram dan sejahtera.

Perkotaan adalah suatu permukiman yang relatif besar, padat, dan permanen terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial, yang dijabarkan dalam 10 kriteria yang lebih spesifik untuk merumuskan kota. Menurut Amos Rapoport dalam Fahmi (2009:10), kriteria tersebut meliputi :

1. Ukuran dan jumlah penduduk yang besar terhadap massa dan tempat
2. Bersifat permanen
3. Kepadatan minimum terhadap jumlah penduduk dan luas wilayah
4. Struktur dan tata ruang perkotaan, seperti yang ditunjukkan jalur jalan dan ruang perkotaan yang nyata
5. Tempat dimana masyarakat tinggal dan bekerja
6. Fungsi perkotaan minimum, seperti pasar, pusat administrasi atau pemerintahan, pusat militer, pusat keagamaan, atau pusat aktivitas intelektual
7. Heterogenitas dan perbedaan yang bersifat hirarki pada masyarakat
8. Pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah pertanian ditepi kota dan memeroses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas
9. Pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat
10. Dan pusat penyebaran

Pembangunan kota harus diupayakan untuk lebih meningkatkan produktifitas yang mendorong sektor-sektor perekonomian, tetapi pengembangan perlu

memperhatikan ketersediaan sumber daya, agar pemanfaatan sumber daya untuk pelayanan sarana dan prasarana kota lebih efisien. Pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan mengacu pada pengembangan investasi yang berwawasan lingkungan, sehingga tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan tidak merusak kekayaan budaya daerah. Hal tersebut juga diperlukan agar tercipta keadilan yang tercermin pada pemerataan kemudahan dalam memperoleh kehidupan perkotaan, baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari lapangan pekerjaan Zahnd dalam Fahmi (2009:10).

Pengorganisasian sebuah pemukiman dapat dirumuskan sebagai kota, bukan dari segi ciri-ciri morfologis tertentu atau kumpulan ciri-cirinya, melainkan dari segi suatu fungsi khusus yaitu sebuah wilayah dan menciptakan ruang yang efektif. Lima paradigma baru yang menyebabkan perubahan dan perkembangan pola pikir dalam perencanaan wilayah atau kota, yaitu : perekonomian global, orientasi pembangunan, kemitraan pemerintah dan masyarakat, perkembangan sistem informasi dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (Rapoport, 2009:11)

Secara umum manajemen perkotaan (*Urban Management*) adalah suatu upaya proses pelaksanaan rencana kota untuk mencapai sasaran pembangunan kota secara efisien dan efektif. Sedangkan menurut Nurmandi (2006:125) mengemukakan bahwa manajemen perkotaan merupakan pendekatan yang kontemporer untuk menganalisis permasalahan perkotaan.

Manajemen perkotaan dan wilayah menurut George R. Terry secara garis besar terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, yang dilihat dari sisi perencanaan kota dalam Sadyohutomo (2009:21) masing-masing meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang harus oleh setiap manajer dan staf. Kata perencanaan (*Planning*) merupakan istilah umum yang sangat besar cakupannya. Pengertian dari perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun suatu rencana. Rencana (*plan*) adalah produk dari proses perencanaan yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui tahapan-tahap kegiatan. Dalam manajemen keruangan, sasaran perencanaan dalam manajemen terdiri atas hal-hal berikut :

- a. Perencanaan kebijaksanaan publik (*public policy*) : rencana tata ruang kota dan wilayah, peraturan-peraturan daerah.
- b. Perencanaan organisasi dan perencanaan program kegiatan organisasi pengelola kota dan wilayah.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dan bagaimana hubungan antar kegiatan tersebut dalam suatu bentuk struktur organisasi atau institusi. Institusi yang dominan dalam mengelola manajemen kota dan wilayah adalah organisasi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, bupati/walikota membagi habis tugas pengelolaan kota dan wilayah kepada dinas, badan, kantor, dan unit pelaksana teknis. Organisasi pelaksana pengelola kota atau wilayah tersebut langsung bertanggung jawab kepada penguasa daerah (walikota/bupati). Ukuran dan bentuk struktur organisasi pemerintah kota atau wilayah tersebut bervariasi tergantung kebutuhan daerah.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Setelah organisasi terbentuk maka untuk dapat bergerak diperlukan sumber daya manusia. Untuk itu dilakukan staffing, yaitu pengisian orang yang sesuai untuk melaksanakan tugas dan fungsi bagian-bagian organisasi. Penempatan orang pada simpul atau bagian organisasi tersebut dibarengi dengan hak atau wewenang dan kewajiban masing-masing pejabatnya secara jelas. Dalam penempatan calon pejabat yang akan menggerakkan fungsi-fungsi organisasi (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian) harus diketahui gaya memimpin dan kemampuan manajerialnya, baik manajerial umum maupun manajerial perubahan. Pelaksanaan meliputi pembangunan dan pengaturan sumberdaya manusia sebagai pelaksana dan penggerak fungsi organisasi.

4. Pengendalian (*Controlling*)

Kegiatan pengendalian mencakup pengendalian intern organisasi dan eksternal organisasi atau kegiatan yang terjadi di masyarakat. Pengendalian intern organisasi dilakukan sesuai dengan budaya organisasi

yang ada. Tujuan pengendalian organisasi adalah agar pelaksanaan tugas dan fungsi setiap komponen organisasi sesuai rencana dan program yang telah ditetapkan. Biasanya di dalam pelaksanaan rencana tidak bersifat kaku karena dalam kurun waktu kegiatan dapat dilakukan evaluasi dan revisi/penyesuaian rencana program dengan perkembangan kondisi yang terjadi. Untuk pengendalian ekstern, prasyarat sebelum dilakukan pengendalian adalah telah adanya pembinaan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi, pedoman teknis, bimbingan, pelatihan dan arahan. Upaya pengendalian diawali dengan kegiatan pemantauan terhadap penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah/ruang. Data hasil pemantauan kemudian dievaluasi apakah terjadi indikasi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam manajemen perkotaan, aktor-aktor yang terlibat bukan hanya dari lembaga formal saja, tetapi lembaga-lembaga informal dan non-pemerintahan berperan dalam semua lini kehidupan masyarakat kota. *Urban Management Program (UPM)*, sebuah organisasi PBB dibawah UNHCS (Nurmandi, 2006 : 57), menggambarkan bahwa pemerintah kota adalah salah satu aktor yang menjalankan peranan vital dalam manajemen perkotaan. Selain itu terdapat duan aktor yang perlu dilibatkan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kota, yaitu LSM dan sektor swasta.

Pemahaman yang lebih luas Richard E. Stern (dalam Nurmandi, 2014:14) menyatakan bahwa tata kelola perkotaan mencakup empat elemen yaitu, (1)

Proyek pembangunan perkotaan dalam konteks wilayah kota dan pertimbangan kelembagaan, (2) memusatkan perhatian kepada sumber daya keuangan lokal untuk memperkuat desentralisasi, (3) memusatkan perhatian kepada berbagai alternatif untuk mengorganisir dan membiayai pelayanan kota, seperti air bersih, transportasi, listrik, kesehatan, dan sampah, (4) perhatian untuk mencari dan mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kota.

Manajemen perkotaan secara implisit dilakukan oleh banyak aktor pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, tokoh informal, organisasi parastatal dan lain sebagai mencakup dimensi yang luas. Pemerintah dalam hal, terutama pemerintah kota atau pemerintah di daerah perkotaan, memiliki peran sentral dan berfungsi sebagai fasilitator. Kebijakan, rencana, program, dan praktek dalam kerangka pengelolaan daerah perkotaan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tumbuh secara cepat, yaitu kebutuhan akan pelayanan publik, infrastruktur dasar, lapangan kerja dan perumahan (Nurmandi, 2014:14).

Pemerintahan daerah, baik kota ataupun metropolitan, secara tipikal harus menangani enam sektor perkotaan yang saling berhubungan, yaitu pertanahan, lingkungan, infrastruktur, perumahan, fasilitas sosial, dan pembangunan ekonomi. Sebagai akibat dari kompleksitas sektor-sektor yang mempengaruhi manajemen perkotaan, maka model manajemen pun harus bersifat luwes dan tidak hierarkis, dengan fungsi-fungsi manajemen yang dapat menangkap perubahan dinamis, terutama dalam menangani kota-kota baru tersebut. Edward Leman (dalam Nurmandi, 2014:131), sebagai contoh, mengajukan fungsi-fungsi manajemen yang dianggap relevan untuk menangani daerah perkotaan dalam arti luas. Dalam

manajemen lahan dan manajemen pembangunan infrastruktur, fungsi-fungsi manajemen dapat diterapkan. Namun, yang menjadi perhatian disini adalah ruang lingkup dari unsur-unsur manajemen perkotaan. Implementasi dari suatu fungsi dari suatu unsur tidak dapat berdiri sendiri, karena berhubungan dengan implementasi fungsi yang sama pada unsur manajemen yang lain. Fungsi-fungsi manajemen tersebut mencakup fungsi pemasaran, fungsi manajemen operasional, fungsi informasi, fungsi keuangan, fungsi pengembangan sumber daya manusia, dan fungsi pengembangan organisasi (Nurmandi, 2014:132-133).

1. Fungsi pemasaran : dalam pemerintahan, fungsi pemasaran terutama ditujukan pada pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat yang mampu membayar kebutuhannya. Untuk itu, pemerintah kota dapat melakukan penelitian pasar (*market research*) untuk mengidentifikasi permintaan konsumen atau masyarakat dalam hal kemampuannya membayar. Fungsi pemasaran juga dapat mengacu kepada pemasaran sosial (*social marketing*) dan hubungan kemasyarakatan (*public relations*) dalam hal mana pemerintah kota berusaha memasarkan produk atau programnya kepada masyarakat. Tercakup pula fungsi promosi yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota, terutama dalam mendesiminasikan informasi, perolehan modal, dan dukungan dari pihak masyarakat atau pihak swasta.
2. Fungsi manajemen operasional : menyangkut kegiatan sehari-hari pemerintah kota seperti pelayanan air minum, penanganan sampah kota, dan pemeliharaan fasilitas sosial.

3. Fungsi manajemen informasi : mencakup pemberian atau pertukaran informasi, baik dalam bentuk olahan komputer, tulisan, gambar atau peta.
4. Fungsi manajemen keuangan : mencakup perencanaan keuangan, penggalan sumber-sumber pendapatan baru, dan pengawasan keuangan.
5. Fungsi pengembangan organisasi : fungsi yang fundamental dalam pengelolaan kota. Tantangan baru dari masyarakat memerlukan praktek manajemen baru. Pemerintah kota harus dapat membentuk pola kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam pemberian pelayanan tertentu.

B. *E-Government*

1. Pengertian *E-Government*

E-Government merupakan kependekan dari *Electronic Government* adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem.

Indrajit dalam Budi dan Lestari Tri (2012:36), *E-Government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan.

The World Bank Group : “*E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the internet and mobile computing) that have ability to transform relations with citizens, business and another arm Government*” (Penggunaan teknologi informasi oleh aparat pemerintah mampu meningkatkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan dengan sesama pemerintah itu sendiri)

Menurut Inpres No. 3 Tahun 2003, *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha maupun instansi lain).

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *E-Government* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antar pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

Pengembangan aplikasi teknologi informasi (*E-Government*) merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

yang berbasis teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien serta dengan standar operasional prosedur yang jelas. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 aktivitas yang berkaitan yaitu :

- a. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
- b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat diseluruh wilayah negara.

2. Tujuan *E-Government*

Adapun arah dan tujuan yang ingin dicapai melalui aplikasi *E-Government* adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya sistem jaringan berbasis teknologi internet yang dapat menghubungkan antar instansi pemerintah, pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat serta menghubungkan antar pemerintah dengan masyarakat global yang memungkinkan mekanisme komunikasi dua arah dalam rangka peningkatan koordinasi, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Terselenggaranya aplikasi sistem informasi atau sistem pengolahan data yang terpadu guna mendukung penyebaran informasi sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas publik.

- c. Terselenggaranya otomatisasi pekerjaan kantor dan aplikasi pelayanan publik yang mampu memberi kemudahan akses bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dari penjelasan tersebut, ada 4 indikator keberhasilan E-Government (Budi dan Lestari Tri, 2012:39), yaitu :

1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data
2. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah
3. Ketersediaan aplikasi *E-Government* pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik.
4. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat.

3. Tipe Relasi *E-Government*

Indrajit dalam Budi dan Lestari Tri (2012:40) Tipe relasi dalam *E-Government* dapat dibedakan dalam empat tipe sebagai berikut :

- a. *Government to Citizens (G-to-C)*

Tipe *G-to-C* ini merupakan aplikasi *E-Government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. tujuan utama dibangunnya aplikasi *E-Government* bertipe *G-to-C* adalah untuk mendekatkan

pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahannya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

b. *Government to Business (G-to-B)*

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan dengan semestinya. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

c. *Government to Government (G-to-G)*

Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbaur diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerja sama antar negara dan kerja sesama entity-entity negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain-lain.

d. Government to Employees (G-to-E)

Aplikasi *E-Government* juga diperuntukan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat (public service).

Indrajit dalam Budi dan Lestari Tri (2012:42), Ada beberapa jenis yang dapat dilakukan melalui *E-Government* yaitu : *publish, interact and transact*. *Publish* yaitu komunikasi satu arah yang dimana pemerintah menyiapkan situs web internet berisi data dan informasi yang dimiliki dan dapat diakses secara langsung oleh masyarakat umum tanpa dibatasi oleh lokasi dan waktu. *Interact* yaitu pelayanan komunikasi dua arah antar pemerintah dengan pihak yang berkepentingan dapat berdialog, bertanya atau berdiskusi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Sedangkan *transact* adalah mekanisme komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani.

4. Sumber Daya Dalam *E-Government*

Aktivitas manajemen tidak lain adalah proses mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Manajer atau pimpinan berkewajiban mengelola sumber daya agar dapat digunakan dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Pimpinan organisasi hendaknya memfasilitasi, memperkuat dan mempertahankan sumber daya manajemen secara proposional. Sumber daya yang dibutuhkan dalam mewujudkan *E-Government* terdiri dari :

- a. *Hardware* (perangkat keras) computer
- b. *Software* (perangkat lunak) computer

- c. Spesialisasi informasi
- d. *User* (pemakai/SDM)
- e. Fasilitas
- f. Database
- g. Informasi

5. Strategi Pengembangan *E-Government*

E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan public secara efisien, efektif, dan interaktif (Inpres No. 3 Tahun 2003). Dari pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa *E-Government* menawarkan bentuk mekanisme baru dalam memberikan fasilitas pelayanan publik oleh pemerintah yang efisien, transparan dan interaktif. Untuk itulah melalui Inpres No. 3 Tahun 2003, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis *E-Government* perlu dilaksanakan melalui enam strategi, yaitu :

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi

- e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur

C. *Smart City*

1. Pengertian *Smart City*

Definisi *Smart City* atau kota cerdas mengacu pada berbagai unsur penting yaitu faktor manusia, faktor teknologi dan faktor kelembagaan. Faktor manusia, kota cerdas mengacu kepada sebuah kota yang didukung oleh manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaannya, jejaring pengetahuan, dan lingkungan yang bebas kriminal. Faktor teknologi, kota cerdas didefinisikan sebagai kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Faktor kelembagaan sebagai suatu kota yang memiliki masyarakat kota yang terdiri dari pemerintah, kalangan bisnis dan penduduknya memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi.

Menurut Pratama dalam Rauf (2016:21) *Smart City* merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan pada suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada didalamnya. Tujuan dari pendekatan *Smart City* untuk mencapai informasi dan pengelolaan kota yang terintegrasi. Integrasi ini dapat melalui manajemen jaringan digital geografi perkotaan, sumber daya, ekonomi, lingkungan, sosial dan lainnya.

Untuk mewujudkan *Smart City* atau kota cerdas diperlukan visi yang jelas dengan melihat berbagai unsur penting yang mencakup tiga faktor untuk mewujudkan berbagai komponen *Smart City*, yang biasanya mencakup enam dimensi penting (Rauf, 2016:22-24) , yaitu :

1. *Smart Economy* : Implementasi dan penilaian *Smart City* pada dimensi smart economy meliputi dua hal, yakni proses inovasi dan kemampuan daya saing. Kedua hal tersebut berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar, sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan modal utama untuk kemajuan bangsa serta peningkatan pembangunan sumber daya.
2. *Smart People* : Dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan *Smart City*. Pada bagian ini terdapat kriteria proses kreatifitas pada diri manusia dan modal sosial. Kriteria penilaian tersebut diantaranya sebagai berikut:
 - a. Adanya jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan perguruan tinggi yang merata kepada masyarakat dan berbasis IT.
 - b. Adanya komunitas IT atau komunitas lain yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
 - c. Adanya peranan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi.
3. *Smart Governance* : Bagian pada *Smart City* yang mengkhhususkan pada tata kelola pemerintahan yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan demokrasi serta

kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang baik. *Smart Governance* terdiri atas tiga bagian sebagai berikut :

- a. Keikutsertaan masyarakat dalam penentuan keputusan secara langsung maupun *online*
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan public dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan cara penyediaan sistem pelayanan berbasis *web* dan *mobile*.
 - c. Adanya transparansi dalam pemerintahan sehingga masyarakat menjadi tahu.
4. *Smart Mobility* : Pada bagian dimensi *Smart City* ini mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada *smart mobility* ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang pintar, sehingga diharapkan terciptanya layanan publik pada transportasi dan mobilitas yang baik yang mampu memecahkan permasalahan umum di dalam transportasi, seperti kemacetan, pelanggaran lalu lintas, polusi dan lain-lain.
5. *Smart Environment* : Bagian dimensi ini mengkhususkan pada pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan dan berkelanjutan dan memanfaatkan teknologi yang berkaitan pada pengelolaan lingkungan.
6. *Smart Living* : Pada *smart living* terdapat syarat dan kriteria serta tujuan untuk proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Untuk mewujudkan *smart living* ada tiga bagian yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penyediaan sarana internet gratis dan sehat, pemasangan CCTV di tempat umum serta lalu lintas dalam menekan jumlah kriminalitas.
- b. Penyediaan sarana, prasarana dan informasi terkait potensi pariwisata daerah dengan baik dan atraktif memanfaatkan teknologi informasi.
- c. Infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

2. Karakteristik *Smart City*

Menurut Hao, Lei & Yan dalam Rauf (2016:25) Ada empat unsur karakteristik dari *Smart City*, yaitu :

- a. Interkoneksi antara bagian perkotaan, *Smart City* menghubungkan antara communication network, internet, sensor dan recognition untuk membantu komunikasi antar orang, dengan demikian interkoneksi antara bagian perkotaan akan terwujud.
- b. Integrasi sistem informasi perkotaan, hal yang berkaitan dengan internet dan *cloud computing* akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi, data dan internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen
- c. Manajemen perkotaan dan kerjasama layanan, interkoneksi komponen perkotaan serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk membuat menjalankan perkotaan terbaik.

- d. Aplikasi ICT (*Information and Communication Technology*) terbaru, *Smart City* teori manajemen kota modern sebagai panduan yang menekankan penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan dan pelayanan, sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk membuat inovasi, gerakan pembangunan perkotaan.

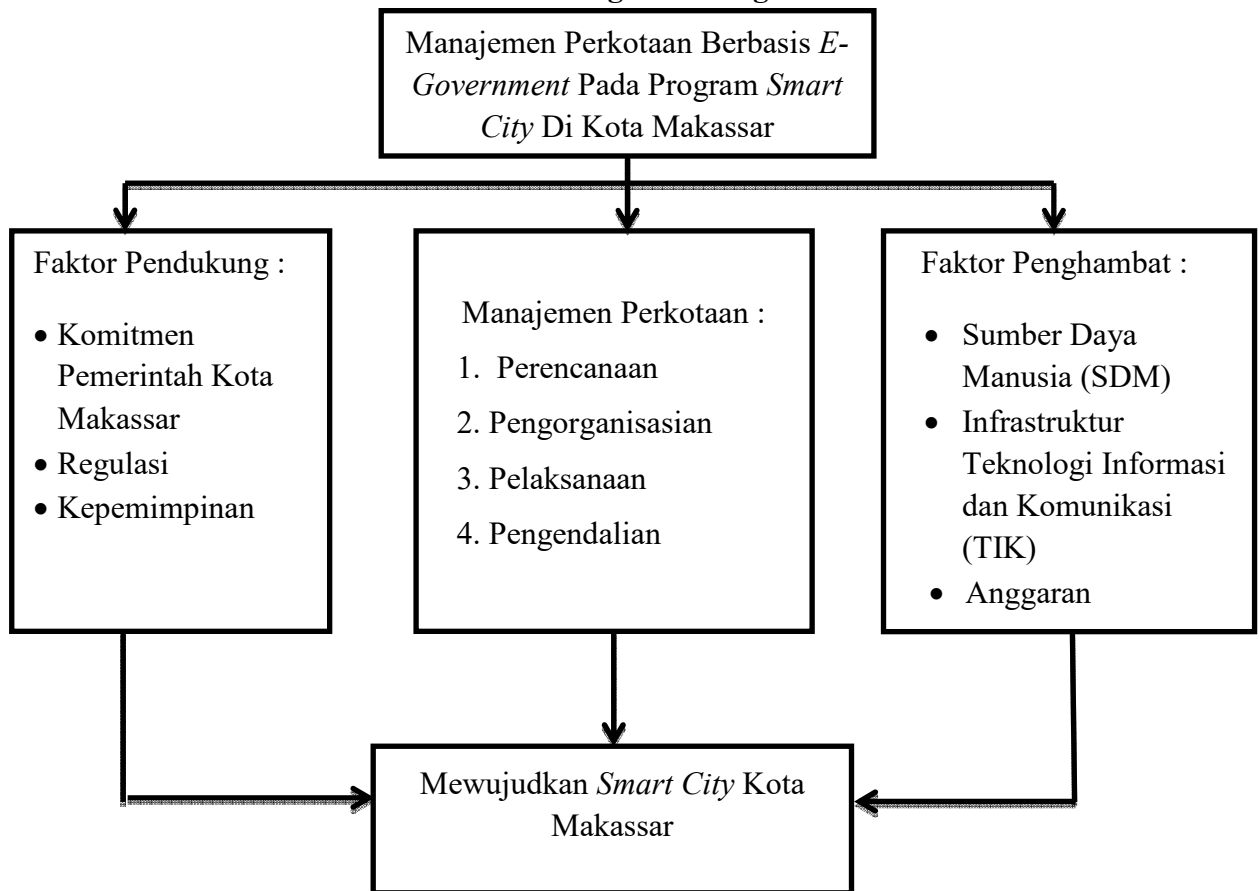
D. Kerangka Pikir

Manajemen kota dan wilayah memberikan dua pengertian yang berbeda dalam hal objek. Pertama, dimaksudkan sebagai manajemen terhadap kota dan wilayah sekitarnya sebagai suatu kesatuan pengelolaan. Kedua, berarti manajemen pada dua objek yang berbeda, yaitu sebagai manajemen kota dan sebagai manajemen wilayah. Fungsi-fungsi manajemen dalam konteks kota dan wilayah menurut George R. Terry dalam Sadyohutomo (2009:21) terdiri dari (a). perencanaan mencakup suatu proses pengambilan keputusan dari produk perencanaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui tahap-tahap tertentu, (b) pengorganisasian mencakup mengelompokkan kegiatan yang diperlukan dan bagaimana hubungan antar kegiatan tersebut dalam suatu bentuk struktur organisasi atau institusi, (c). Pelaksanaan mencakup pengisian orang yang sesuai untuk melaksanakan tugas dan fungsi bagian-bagian organisasi yang dibarengi dengan hak atau kewenangan dan kewajiban masing-masing secara jelas, serta (d). Pengendalian Kegiatan pengendalian mencakup pengendalian intern organisasi dan eksternal organisasi atau kegiatan yang terjadi di masyarakat. Pengendalian intern organisasi dilakukan sesuai dengan budaya organisasi yang ada. Tujuan pengendalian organisasi adalah agar pelaksanaan tugas dan fungsi

setiap komponen organisasi sesuai rencana dan program yang telah ditetapkan. Biasanya di dalam pelaksanaan rencana tidak bersifat kaku karena dalam kurun waktu kegiatan dapat dilakukan evaluasi dan revisi/penyesuaian rencana program dengan perkembangan kondisi yang terjadi.

Smart city merupakan suatu sistem atau konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep smart city yang ada di Makassar dipadukan dengan kultur lokal budaya warga Makassar yakni *Sombere'* (keramahan). Dengan semangat *Sombere'*, maka interaksi antara pemerintah dan masyarakat semakin erat, terbangun kebersamaan, semakin *responship*, tingkat improvisasi lebih tinggi, inisiatif dan keinginan menyelesaikan masalah sesegera mungkin, solutif, inovatif, semakin terbuka untuk melakukan perubahan, pelayanan yang mampu menggabungkan antara gesture (bahasa tubuh) dan lisan yang mencerminkan kecerdasan, keluhuran pekerti dan tata krama yang tinggi. Dengan demikian merekatkan antara *sombere* (*attitude*) dan pelayanan publik merupakan inovasi baru dan cara pandang baru dalam mewujudkan reformasi birokrasi, hal ini sebagai salah komponen penting penyusun pola birokrasi yang diusung oleh Bapak walikota Makassar dan wakil walikota Makassar periode 2014-2019 dengan tagline “Dua Kali tambah Lebih Baik ($2x+\sqrt{\quad}$), *Smart City* dan kota yang berkelas dunia (*world class*) untuk semua”. Untuk penjelasan diatas di dapat dilihat dalam bagan kerangka pikir dibawah ini :

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen perkotaan berbasis *e-government* pada program *smart city* di Kota Makassar dengan indikator yang digunakan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian serta untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung manajemen perkotaan berbasis *e-government* pada program *smart city* di Kota Makassar.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Perencanaan Pemerintah Kota Makassar membuat pedoman perencanaan yang legal, efisien dan terjangkau oleh pelaksana, pedoman tersebut mencakup peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No. 5 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2019 serta pedoman perencanaan yang bersifat operasional atau petunjuk teknis yaitu *masterplan smart city* Kota Makassar yang acuan dan pedoman rencana kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar (SKPD) sehingga pelaksanaan program smart city Kota Makassar dapat sejalan dengan visi-misi pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan *smart city* dalam rangka pembangunan perkotaan.
2. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar membentuk struktur organisasi dengan mengeluarkan SK Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Sombere' dan Smart City Kota Makassar dan hubungan antar tim pelaksana tersebut terus melakukan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Pelaksanaan untuk mewujudkan Makassar sebagai *Smart City* dibutuhkan sebuah program kerja maka dari itu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai program kerja sesuai dengan peran dan tugas masing-

masing agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan

4. Pengendalian dalam pelaksanaan program *smart city* Kota Makassar dilakukan oleh setiap kepala SKPD tersebut baik dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan lainnya kemudian akan kembali ditindak lanjuti oleh Walikota Makassar untuk mengevaluasi apa yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan dapat tindak lanjuti.
5. Faktor Pendukung yaitu, (1). Komitmen pemerintah Kota Makassar, (2). Regulasi, dan (3). Kepemimpinan
6. Faktor Penghambat yaitu, (1). Sumber Daya Manusia (SDM), (2). Infrastruktur (TIK), dan (3). Anggaran
7. Mewujudkan *Smart City* Kota Makassar dalam penelitian ini adalah terlaksananya visi-misi Kota Makassar dalam mewujudkan Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua melalui program *Smart City*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian kurang lebih 2 bulan dimulai pada tanggal 05 Februari sampai 01 Maret 2018. Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar dengan topik yang diteliti adalah mengenai Manajemen Perkotaan Berbasis *E-Government* Pada Program *Smart City* di Kota Makassar. Lokasi penelitian ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar karena terlibat langsung dengan masalah yang akan diteliti dengan dasar pertimbangan karena memiliki peran penting dalam pembangunan perkotaan dengan mengimplementasikan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan program *smart city*.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan menggambarkan secara detail mengenai masalah yang akan diteliti yang didapatkan langsung dari lapangan. (Sugiyono, 2012)

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dimana mengungkapkan suatu masalah atau keadaan yang bersifat memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan dari objek yang diteliti.

C. Sumber data

Sumber data adalah segala sesuatu yang memberikan informasi melalui data. Dimana data hasil dari penelitian melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dan benar-benar terjadi di lapangan.
2. Data Sekunder adalah sebagai data pendukung dari data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari arsip-arsip, laporan-laporan, karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dan data penunjang lainnya.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti. Di mana yang dimaksud disini adalah informan yang diharapkan memberikan data secara obyektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun informan dari penelitian ini berdasarkan manajemen perkotaan berbasis *e-government* pada program *smart city* di Kota

Makassar, Untuk lebih jelasnya, karakteristik informan di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Informan

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Jusman, S.KEL, M.Si	JS	Kepala Seksi Aplikasi dan Telematika	1 Orang
2.	Denny Hidayat, ST, M.Si	DH	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1 Orang
3.	Aswin Ressang, ST	AR	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Tata Ruang dan Bangunan	1 Orang
4.	Suryadi	SY	Staf Bidang Tata Ruang	1 Orang
5.	Robbi Toftazan	RT	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar	1 Orang
Jumlah				5 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2014), Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

- a. *Observation* (observasi), yaitu *proses* penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta Bappeda Kota Makassar, yaitu pengumpulan data dengan melihat secara langsung, pengumpulan data pencatatan yang dilakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada pada objek yang sedang diteliti atau diamati.
- b. *Interview* (wawancara), Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dimana peneliti telah menetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait mengenai manajemen perkotaan berbasis *e-government* pada program *Smart City* di Kota Makassar dengan mencatat dan merekam hal yang dianggap penting untuk melengkapi data.
- c. Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam. yaitu pemanfaatan informal melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap pendukung yang bersumber dari laporan-laporan yang berkaitan dengan manajemen perkotaan berbasis *e-government* pada program *Smart City* di Kota Makassar, metode ini

merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan perkiraan, dengan cara peneliti mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus hal yang dianggap penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwa menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data penelitian sudah harus mulai mengerti dari hal yang ditemukan dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan

berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Menurut sugiyono (2014), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan

dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Makassar

a. Aspek Geografi dan Demografi

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis. Hingga Tahun 2015 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan eduentertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

b. Karakteristik Wilayah Kota Makassar

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas Wilayah Kota layak huni Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan

Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 1.2 Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2015

Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Area (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
010	Mariso	1,82	1,04
020	Mamajang	2,25	1,28
030	Tamalate	20,21	11,50
031	Rappocini	9,23	5,25
040	Makassar	2,52	1,43
050	Ujung Pandang	2,63	1,50
060	Wajo	1,99	1,13
070	Bontoala	2,10	1,19
080	Ujung Tanah	5,94	2,51
090	Tallo	5,83	3,32
100	Panakkukang	17,05	9,70
101	Manggala	24,14	13,73
110	Biringkanaya	48,22	27,43
111	Tamalanrea	31,84	18,12
112	Kepulauan Sangkarrang	15,40	0,87
7371	Kota Makassar	17.577	100,00

Sumber : RPJMD Kota Makassar 2014-2019

Secara administrasi memiliki 15 kecamatan dan 153 kelurahan di kota Makassar, selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau sangkarrang, atau disebut juga pulau-pulau pabbiring, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil (gusung) dan Pulau Kayangan (terdekat).

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Pantai Barat pulau Sulawesi berada dalam titik koordinat $119^{\circ}4'29,038''$ - $119^{\circ}32'35,781''$ Bujur Timur dan $4^{\circ}58'30,052''$ - $5^{\circ}14'0,146''$ Lintang Selatan dengan luasan 17.577 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektar. Menurut Permendagri Nomor 56 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas Kota Makassar tercantum 199,26 km².

3. Topografi

Secara topografi Kota Makassar dicirikan dengan keadaan dan kondisi sebagai berikut: tanah relatif datar, bergelombang, dan berbukit serta berada pada ketinggian 0-25 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng (elevasi) 0-15%. Sementara itu, dilihat dari klasifikasi kelerengannya,

sebagian besar berada pada kemiringan 0-5%. Dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa untuk kondisi ruang seperti ini Kota Makassar sangat berpotensi untuk pengembangan kegiatan permukiman, perdagangan, jasa, industri, rekreasi, pelabuhan laut dan fasilitas penunjang lainnya.

4. Hidrologi

Kota Makassar adalah kota yang letak dan posisinya berada dekat dengan pantai, membentang sepanjang koridor Barat dan Utara, yang biasa juga dikenal sebagai kota dengan ciri "*waterfront city*", didalamnya mengalir beberapa sungai yang kesemuanya bermuara ke dalam kota (Sungai Tallo, Jeneberang, Pampang). Sungai Je'neberang misalnya, yang mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara di bagian Selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan kapasitas sedang (debit air 1-2 m³/detik). Sedangkan Sungai Tallo dan Pampang yang bermuara di bagian Utara Makassar adalah sungai dengan kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m³/detik di musim kemarau. Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya membentang dengan dataran rendah, dimulai dari tepi pantai sebelah Barat dan melebar ke arah Timur sejauh kurang lebih 20 kilometer dan memanjang dari arah Selatan ke arah Utara merupakan koridor-koridor utama kota dalam pengembangan pemukiman, pertokoan, perkantoran, pendidikan dan pusat kegiatan industri di Makassar. Ke depan, dengan segala potensi dan keunggulan yang dimilikinya, diharapkan kota ini bisa tumbuh dan berkembang jauh lebih baik dan berbudaya serta berbasis pada kepentingan masyarakat dan juga bisa menjadi ruang tamu Indonesia Timur.

5. Klimatologi

Secara garis besar Kota Makassar beriklim tropis karena wilayah ini dipengaruhi monsoon barat dan pola curah hujan ekuatorial karena letak geografisnya di dekat ekuator. Temperatur udara rata-rata bulanan Kota Makassar berkisar antara 25,3-26,13oC. Temperatur udara rata-rata bulanan tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan Nopember, dan terendah pada bulan Agustus. Suhu udara minimum rata-rata bulanan berkisar antara 25,3° C yang terjadi pada bulan Agustus dan tertinggi 28,4° C pada bulan oktober. Suhu udara maksimum rata-rata bulanan berkisar antara 30,1°C pada bulan oktober dan minimum 22,3° C pada bulan September.

Curah hujan rata-rata bulanan terjadi di musim hujan dan musim kemarau, dengan curah hujan rata-rata bulanan lebih besar dari 200 mm terjadi pada bulan Desember sampai April. Musim kemarau dengan curah hujan rata-rata bulanan lebih kecil dari 200 mm terjadi pada bulan Mei sampai November. Besar curah hujan rata-rata bulanan berkisar antara 10 sampai 664 mm dengan curah hujan terendah terjadi pada bulan September dan tertinggi pada bulan Februari.

Kelembapan udara yang relatif tinggi yaitu berkisar antara 71,8 sampai 87,4%. Kelembapan udara tertinggi terjadi pada bulan januari kemudian menurun sampai terendah pada bulan september dan naik lagi sampai pada bulan desember. Penyinaran matahari rata-rata bulanan di kota Makassar berkisar antara 43,7 sampai 92%.

Penyinaran matahari cenderung meningkat dari bulan Mei sampai mencapai maksimum pada bulan September, kemudian menurun sampai bulan Desember. Kecepatan berkisar antara 8 sampai 14 knots. Selama tahun 2012 arah angin dominan dari arah barat (35%) kemudian dari arah barat laut (27 %), arah timur (15 %), arah timur laut (8%) dan sebagian kecil datang dari arah tenggara, utara, selatan dan barat daya.

6. Demografi

Kota Makassar kini berkembang tidak lagi sekedar gateway namun diposisikan sebagai ruang keluarga (*living room*) di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai kota metropolitan, Makassar tumbuh dengan ditunjang berbagai potensi, yang salah satunya adalah jumlah penduduk. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kota Makassar

No.	Kecamatan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Mariso	50.778	52.937	55.772	57.648	71.039	71.096
2.	Mamajang	51.481	53.401	55.864	57.575	71.570	72.543
3.	Makasar	73.819	77.305	81.051	83.806	105.725	105.128
4.	Ujung Pandang	24.391	25.360	26.456	27.152	30.982	30.338
5.	Wajo	31.806	33.521	35.280	36.432	39.350	38.937
6.	Bontoala	55.538	57.414	60.024	62.047	67.333	67.295

7.	Tallo	143.092	147.693	155.000	161.026	170.257	171.284
8.	Ujung Tanah	47.090	48.813	51.085	52.807	55.935	55.878
9.	Panakkukang	143.004	148.613	156.198	161.269	167.759	169.118
10.	Tamalate	169.920	178.899	192.678	202.222	209.506	211.045
11.	Biringkanaya	189.831	198.615	212.148	220.679	222.969	226.936
12.	Manggala	128.852	134.561	142.998	148.614	149.552	152.687
13.	Rappocini	141.533	148.132	155.919	161.376	169.603	168.843
14.	Tamalanrea	100.355	106.022	112.182	117.577	120.726	112.258
15.	Kepulauan Sangkarang	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1.351.490	1.411.286	1.492.655	1.550.230	1.652.306	1.653.386

Sumber : RPJMD Kota Makassar 2014-2019

Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk Kota Makassar sepanjang 2010 sampai 2015 telah mengalami laju pertumbuhan dilihat dari masing-masing setiap kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Tabel 1.4 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Makassar

Kode Wilayah	Kecamatan	Persentase	Kepadatan Penduduk
10	Mariso	4,06	32.316
20	Mamajang	4,19	27.013
30	Tamalate	13,16	9.436
31	Rappocini	11,21	17.610

40	Makassar	5,82	33.490
50	Ujung Pandang	1,95	10.752
60	Wajo	2,12	15.438
70	Bontoala	3,88	26.782
80	Ujung Tanah	3,37	8.229
90	Tallo	9,56	23.773
100	Panakkukang	10,14	8.620
101	Manggala	9,32	5.594
110	Biringkanaya	13,57	4.077
111	Tamalanrea	7,65	3.481
7371	Kota Makassar	100	8.246

Sumber : RPJMD Kota Makassar 2014-2019

Berdasarkan tabel diatas persentase penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Biringkanaya yaitu sebesar 13,57% dengan tingkat kepadatan penduduk 4.077 sementara kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan UjungPandang dengan persentase penduduk 1,95%. Hal ini memberi gambaran bahwa distribusi penduduk yang terjadi di Kota Makassar tidak merata, dimana luas wilayah tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk, dalam artian bahwa luas wilayah yang besar tidak harus mempunyai jumlah penduduk yang besar demikian pula sebaliknya luas wilayah yang kecil tidak harus mempunyai jumlah penduduk yang kecil.

c. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat disini terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga, dimana Pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil akan mendorong peningkatan kemampuan faktor faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa sehingga dapat memacu berkembangnya perekonomian dalam skala yang lebih besar dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk.

1. Ekonomi

Kemajuan pembangunan ekonomi yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2012-2015 Kota Makassar mendorong meningkatnya nilai PDRB yang diciptakan. Pada tahun 2012 angka PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Kota Makassar atas dasar Harga Berlaku mencapai Rp.78,01 Trilyun dan nilai PDRB berdasarkan Harga Konstan Rp.70,85 Trilyun. Pada tahun 2015 nilai PDRB Kota Makassar telah mencapai Rp.114,17 Trilyun atas dasar Harga Berlaku dan Rp.88,74 Trilyun atas dasar Harga Konstan. Kontribusi terbesar nilai PDRB Kota Makassar diberikan oleh sektor tersier (Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa). Jika dikelompokkan, sektor primer kontribusinya sebesar 0,75%, sektor sekunder sebesar 37,07% dan sektor tersier sebesar 62,18%. PDRB Kota Makassar yang

terbesar ditunjang oleh sektor (tersier) jasa menunjukkan bahwa Makassar sudah semakin mapan ekonominya. Namun bila dilihat pada tingkat Provinsi, pada tahun 2015 Kota Makassar memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 33,41% pada tahun 2011 menjadi sebesar 33,93%.

2. Pendidikan

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia yaitu sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa kualitas manusia yang baik ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan, pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Selama periode tahun 2011 - 2015 berbagai program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Makassar yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan taraf pendidikan penduduk yang meningkat secara bertahap.

d. Visi dan Misi Kota Makassar

a. Visi Kota Makassar

Visi adalah gambaran tentang kondisi Kota Makassar yang akan diwujudkan pada periode 2014-2019. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang dijelaskan dan dijabarkan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Rumusan visi

ini juga memperhatikan visi Kota Makassar 2025 dan visi Provinsi Sulawesi Selatan 2018.

Visi Kota Makassar 2025 adalah ***“Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”***. Visi Provinsi Sulawesi Selatan 2018 adalah ***“Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”***.

Terhadap visi Kota Makassar 2005-2025, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJPD untuk RPJMD periode 2014-2019. Terhadap visi Provinsi Sulawesi Selatan 2018, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang relevan dengan isu strategis Kota Makassar.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah Kota Makassar dengan memperhatikan sepenuhnya visi kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 adalah: ***“Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua”***

Visi Pemerintah Kota Makassar 2019 ini memiliki konsistensi dengan visi Kota Makassar 2025, khususnya dengan penekanan visi RPJPD pada orientasi global, yang dalam visi RPJMD dirumuskan sebagai kota dunia, serta penekanan berwawasan lingkungan dan paling bersahabat pada visi RPJPD yang pada visi RPJMD dirumuskan sebagai yang nyaman untuk semua. Pokok visi kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa pada visi RPJPD, dalam visi

RPJMD 2013-2018 ditempatkan sebagai bagian dari substansi kota dunia. Dihubungkan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2018, relevansi visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 terletak pada posisi Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua yang merupakan bagian penting dari terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018.

Pernyataan visi Pemerintah Kota Makassar 2019 memiliki tiga pokok visi yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada akhir periode 2014-2019. Penjelasan masing-masing pokok visi tersebut, adalah sebagai berikut.

Kota Dunia, dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi atau memukau dalam banyak hal. Diantaranya potensi sumberdaya alam dan infrastruktur sosial ekonomi yang menjanjikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan standar dunia. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya masyarakat sejahtera standar dunia.

Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan bagi berkembangnya masyarakat yang mengedepankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara antara stakeholder dan stakeowner dalam

pembangunan. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya kota nyaman kelas dunia.

Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan kemampuan diri (termasuk kelompok difabel). Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi.

b. Misi Kota Makassar

Misi dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan pokok visi yang relevan. Misi selanjutnya diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rumusan misi RPJMD Kota Makassar 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera Standar

Dunia

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal (1) pengurangan pengangguran, (2) pemberian jaminan sosial keluarga dan disabilitas, (3) pelayanan kesehatan gratis (4) pelayanan pendidikan gratis, (5) penukaran sampah dengan beras, (6) pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir, (7) pembangunan rumah murah, dan (8) pengembangan kebun

kota. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi masyarakat sejahtera standar dunia.

2. Tata Ruang Kota Menjadi Kota Nyaman Berkelas Dunia

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal (1) penyelesaian masalah banjir, (2) pembentukan badan pengendali pembangunan kota, (3) pembangunan waterfront city, (4) penataan transportasi publik, (5) pengembangan infrastruktur kota, (6) pengembangan pinggiran kota, (7) pengembangan taman tematik, (8) penataan lorong. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi kota nyaman kelas dunia.

3. Mereformasi Tata Pemerintahan Menjadi Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas Korupsi

Misi ini mencakup upaya umum dalam hal (1) peningkatan pendapatan asli daerah, (2) peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW, (3) peningkatan pelayanan di kelurahan, (4) pelayanan publik langsung ke rumah, (5) pengembangan pelayanan publik terpadu di kecamatan, (6) modernisasi pelayanan pajak dan distribusi, (7) pengembangan akses internet pada ruang publik, (8) penguatan badan usaha milik daerah. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi.

2. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar, berganti wajah. Jika sebelumnya dikenal sebagai Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar,

kini berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan daerah (Perda) Kota Makassar No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Otonomi Daerah Kota Makassar.

Adapun pertimbangan yang melatari perubahan ini adalah bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah diperlukan penyesuaian dan perubahan terhadap kelembagaan perangkat daerah Kota Makassar, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pada pasal 21 Perda No. 3 Tahun 2009 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, dan mengendalikan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi, meliputi, pengembangan informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan media, pemberdayaan kelembagaan serta pos dan telekomunikasi.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Mengelola informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kota Makassar
- b. Mengelola nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Kota Makassar
- c. Mengelola *e-government* di lingkup Pemerintah Kota Makassar

b. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar menetapkan visi sebagai berikut : ***“Terwujudnya Makassar Smart City berbasis teknologi informasi dan Komunikasi”***

Makna pokok yang terkandung dalam Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar tersebut antara lain :

- a. Makassar *Smart City* adalah kota yang lebih cerdas, yaitu layak huni, efisien, dan berkelanjutan. *Smart city* paling tidak meliputi enam dimensi, yaitu ekonomi, mobilitas, lingkungan, manusia, kehidupan dan pemerintahan.;
- b. Pelayanan Informasi dan Komunikasi, adanya pelayanan Informasi dan Komunikasi yang disebarluaskan melalui berbagai media dan teknologi terkini, merupakan suatu syarat mutlak untuk dapat mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan menuju masyarakat maju dan mandiri.

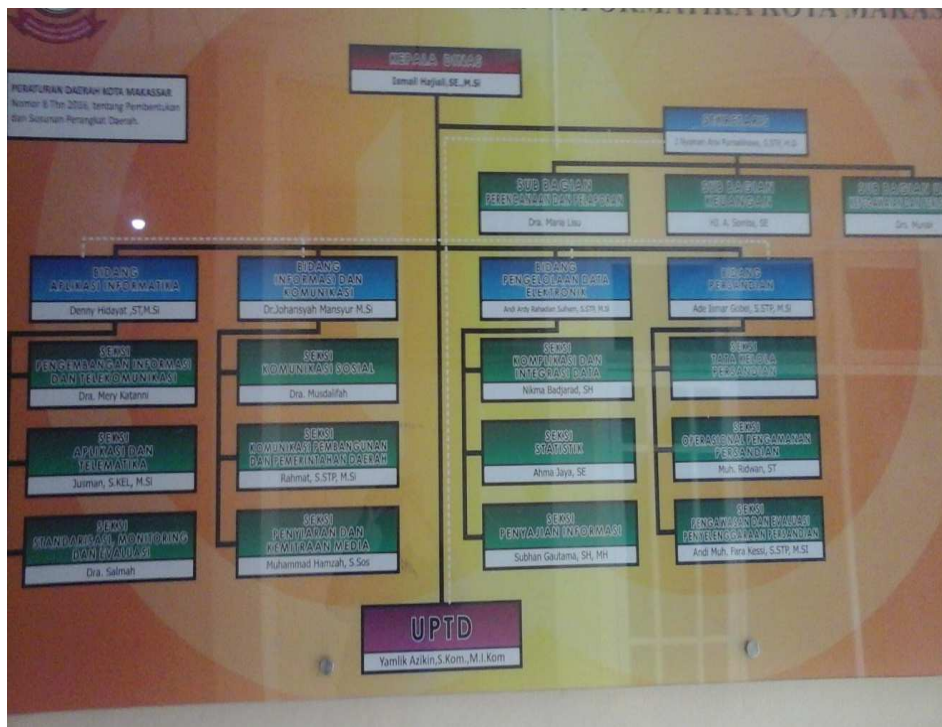
Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publikasi yang profesional berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk pelayanan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi disemua lembaga pemerintahan;
4. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan bersama komunitas teknologi informasi berbasis potensi lokal;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

a. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar



3. Profil Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penataan Ruang.

Dinas Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Penataan Ruang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.

a. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Tata Ruang, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
3. Seksi Pengendalian Ruang.

4. Bidang Pengembangan Tata Ruang dan Bangunan, terdiri atas:

1. Seksi Pelayanan Informasi Tata Ruang dan Bangunan;
2. Seksi Pemetaan dan Pengembangan Sistem Data dan Informasi;
3. Seksi Dokumentasi dan Evaluasi.

5. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Desain Bangunan;
2. Seksi Kelayakan Bangunan;
3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Bangunan.

6. Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan, terdiri atas:

1. Seksi Pengaduan dan Pengawasan Ruang dan Bangunan;
2. Seksi Pengkajian Pelanggaran Hukum Ruang dan Bangunan;
3. Seksi Penindakan Hukum Tata Ruang dan Bangunan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

b. Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar

Dinas Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang;
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang penataan ruang;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana, Dinas Penataan Ruang mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penataan ruang;
- b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;

- c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Tata Ruang, Bidang Pengembangan Tata Ruangdan Bangunan, Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan;
- d. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- e. mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
- g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan(SP) dinas;
- h. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;

- i. merumuskan kebijakan teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- j. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan penataan ruang dan penataan bangunan;
- k. melaksanakan pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang;
- l. menyusun rencana dan program pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota;
- m. menyusun rencana dan program pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang;
- n. menyusun rencana dan program pembinaan dan pengawasan penelitian gambar situasi bangunan dan penyelenggaraan dokumentasi;
- o. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- p. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

- r. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedomandalam melaksanakan tugas;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- t. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- u. membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- v. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- w. melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;
- x. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota

3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar

a. Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Makassar

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan sekretariat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) BAPPEDA Kota Makassar memiliki tugas pokok perencana penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan Daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sedangkan fungsi BAPPEDA adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Bappeda Kota Makassar

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Makassar terdiri atas :

1. Kepala Badan,
2. Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang : Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

3. Tiga belas orang Kasubag/Kasubid :

a. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

- Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
- Sub Bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata
- Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan

b. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum terdiri atas :

- Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan

c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri atas :

- Sub Bidang Infrakstruktur
- Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi
- Sub Bidang Pengembangan Wilayah

d. Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri atas :

- Sub Bidang Perencanaan Makro
- Sub Bidang Pengendalian
- Sub Bidang Pelaporan.

B. Manajemen Perkotaan Berbasis *E-Government* Pada Program *Smart City* di Kota Makassar

Secara umum manajemen perkotaan (*Urban Management*) adalah suatu upaya proses pelaksanaan rencana kota untuk mencapai sasaran pembangunan kota secara efisien dan efektif. Fungsi-fungsi manajemen dalam konteks kota dan wilayah menurut George R. Terry dalam Sadyohutomo (2009:21) terdiri dari (a). perencanaan mencakup suatu proses pengambilan

keputusan dari produk perencanaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui tahap-tahap tertentu, (b) pengorganisasian mencakup mengelompokkan kegiatan yang diperlukan dan bagaimana hubungan antar kegiatan tersebut dalam suatu bentuk struktur organisasi atau institusi, (c). Pelaksanaan mencakup pengisian orang yang sesuai untuk melaksanakan tugas dan fungsi bagian-bagian organisasi yang dibarengi dengan hak atau kewenangan dan kewajiban masing-masing secara jelas, serta (d). Pengendalian Kegiatan pengendalian mencakup pengendalian intern organisasi dan eksternal organisasi atau kegiatan yang terjadi di masyarakat. Pengendalian intern organisasi dilakukan sesuai dengan budaya organisasi yang ada. Tujuan pengendalian organisasi adalah agar pelaksanaan tugas dan fungsi setiap komponen organisasi sesuai rencana dan program yang telah ditetapkan. Biasanya di dalam pelaksanaan rencana tidak bersifat kaku karena dalam kurun waktu kegiatan dapat dilakukan evaluasi dan revisi/penyesuaian rencana program dengan perkembangan kondisi yang terjadi.

Smart City merupakan sebuah program dalam pengembangan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan di kota tersebut. Tujuan dari pendekatan *Smart City* untuk mencapai informasi dan pengelolaan kota yang terintegrasi. Integrasi ini dapat melalui manajemen jaringan digital geografi perkotaan, sumber daya, ekonomi, lingkungan, sosial dan lainnya.

Visi dari kota Makassar dengan menerapkan *e-government* ini ialah menjadikan Makassar sebagai kota dunia yang nyaman untuk semua. Untuk

mencapai visi ini maka diperlukannya *Smart City*. Hal ini berarti pemerintah Kota Makassar tidak hanya menciptakan sistem kerja pemerintahan yang efektif, efisien dan juga transparan, namun pemerintah kota harus menciptakan kota pintar atau *smart city* untuk mendorong perwujudan lingkungan yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur, ekonomi, kelembagaan dan tata kelola perkotaan yang lebih mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dimana *smart city* merupakan pendekatan menuju kota yang layak huni dan berkelanjutan.

Menjadikan Makassar sebagai kota dunia yang nyaman untuk semua, merupakan visi dari pemerintah kota Makassar. Untuk menjalankan serta merealisasi visi ini, maka pemerintah kota menggunakan konsep *smart city* dimana bicara mengenai memanfaatkan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari namun konsep *smart city* ini pun digabungkan dengan kearifan lokal masyarakat yakni *sombere'*, dimana *sombere'* itu berarti terbuka, bergaul, ramah-tamah.

Penggabungan konsep *Sombere'* dan *Smart City* menggabungkan dua hal utama yakni kemajuan ilmu dan pengetahuan teknologi dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Tujuan dibalik penggabungan dua konsep ini adalah pemanfaatan terhadap teknologi tanpa meninggalkan budaya lokal.

Tabel 1.5 Perbandingan sebelum dan sesudah adanya program *smart city* di Kota Makassar

No.	Sebelum program <i>smart city</i>	Sesudah program <i>smart city</i>
1.	Sulitnya mengakses layanan kesehatan yang murah dan nyaman	Setelah adanya terobosan program strategis Pemerintah Kota Makassar yaitu “ <i>Home Care</i> ” kini pelayanan kesehatan dapat ditangani dengan cepat tanpa dibatasi waktu, jarak, dan biaya serta dapat dikonsultasikan langsung dengan dokter ahli sehingga hasil pemeriksaan langsung diperoleh pada saat itu juga.
2.	Masalah persampahan masih belum teratasi seperti sistem pengangkutan sampah yang tidak terangkut, pemungutan liar petugas pemungutan sampah	Pemerintah Kota Makassar telah mencanangkan program <i>Makassar Tidak Rantasa’ (MTR)</i> dan penyediaan fasilitas mobil sampah yang dinamai “ <i>Tangkasaki</i> ” sehingga masalah persampahan dapat terangkut secara merata disetiap rumah warga dan tidak ada lagi pemungutan iuran sampah.

3.	Kurang memadainya pembangunan infrastruktur seperti pengembangan infrastruktur jalan, transportasi publik, telekomunikasi dan lain-lain	Pemerintah Kota Makassar mulai terlihat membangun sejumlah infrastruktur dengan menggandeng beberapa perusahaan dan investor asing contohnya infrastruktur pembangunan jalan tol layang di jalan Pettarani, menara telekomunikasi (jaringan internet), dan transportasi yang diberi nama “ <i>Pete-Pete Smart</i> ” yang dibekali beberapa fitur canggih, dan infrastruktur lainnya.
4.	Pelayanan publik yang masih menerapkan sistem manual dan berbelit-belit	Pelayanan publik sudah dapat diakses secara <i>online</i> tanpa harus menunggu terlalu lama seperti pelayanan izin usaha, akta kelahiran , serta dokumen-dokumen pengarsipan sudah berbasis data <i>online</i> .

berdasarkan tabel diatas bahwa sebelum adanya program smart city masih banyak dijumpai permasalahan kota yang dihadapi seperti sulitnya akses pelayanan kesehatan, persampahan, kurangnya pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik yang masih menerapkan sistem manual dan berbelit-belit

namun setelah adanya program smart city permasalahan tersebut sudah mampu bisa diatasi dengan program-program inovasi dari Pemerintah Kota Makassar sehingga dengan adanya program ini bisa menjadi sebuah terobosan baru untuk menanggulangi permasalahan perkotaan yang semakin kompleks khususnya di Kota Makassar.

Berikut pemaparan dari hasil wawancara yang di dapatkan dari lokasi penelitian, sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang harus oleh setiap manajer dan staf. Kata perencanaan (*Planning*) merupakan istilah umum yang sangat besar cakupan kegiatannya. Pengertian dari perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun suatu rencana. Rencana (*plan*) adalah produk dari proses perencanaan yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui tahapan-tahap kegiatan.

Tabel 1.6 Rencana Induk *Sombere' & Smart City* Kota Makassar

Visi	Misi	Komponen	Program	Sasaran
Makassar Kota Dunia Yang	1.Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera Standar Dunia	1. <i>Smart Governance</i> 2. <i>Smart Branding</i>	1. Tata kelola IT <i>Governance</i> 2. <i>Branding City</i> 3. <i>Economic</i>	1. Manajemen Kota yang terintegrasi dan interoperabilitas dengan menggunakan <i>ICT</i> 2. Manajemen birokrasi yang efisien (<i>efficient e-</i>

Nyaman Untuk Semua	2. Tata Ruang Kota Menjadi Kota Nyaman Berkelas Dunia 3. Mereformasi Tata Pemerintahan Menjadi Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas Korupsi	3. <i>Smart Economy</i> 4. <i>Smart Living</i> 5. <i>Smart Society</i> 6. <i>Smart Environment</i>	<i>Transformation</i> 4. <i>Liveable World City</i> 5. <i>Public Engagement</i> 6. <i>Environment Protection</i>	<i>governance)</i> 3. Mengembangkan sistem layanan, keamanan jaringan serta asuransi keamanan (<i>infrastructure, development, security and assurance</i>) 4. Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (<i>Tourism Branding</i>) 5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat (<i>sharing economy</i>) 6. Mengintegrasikan tata ruang wilayah dengan wilayah sekitar 7. Mewujudkan system keamanan lingkungan masyarakat (<i>resilient city</i>)
--------------------------	---	---	---	--

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam mengenai bagaimana perencanaan yang dilakukan dilingkup Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Tata Ruang dan Bangunan Bidang Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar menyatakan bahwa sebagai berikut :

“Perencanaan penataan ruang dari dinas tata ruang kita sudah koordinir sesuai dengan perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Makassar sudah ada melalui dinas tata ruang Kota Makassar agar konsep pengembangan program *smart city* yang diinginkan

oleh bapak Walikota sesuai dengan visi-misi Kota Makassar untuk mencapai hasil tersebut program *smart city* diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kota khususnya dibidang tata ruang dan bangunan” (hasil wawancara AR tanggal 15 Februari 2018)

Berikut pernyataan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Kepala Seksi Aplikasi dan Telematika Kota Makassar terkait dengan perencanaan dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, menyebutkan bahwa :

“Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar membuat rencana dengan menyusun *masterplan Smart city* dimana penyusunan ini sebagai landasan materi dan panduan pembangunan konsep kota masa kini dan masa depan dalam wujudkan Makassar sebagai *smart city* yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi agar dapat memberikan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan kota” (Hasil wawancara JS tanggal 07 Februari 2018)

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa perencanaan pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan program smart city dengan produk perencanaan melalui peraturan daerah serta dokumen perencanaan lainnya yang menyesuaikan visi-misi pembangunan Kota Makassar untuk mewujudkan seperti Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Rencana tata Ruang dan wilayah (RTRW) di koordinir Dinas Tata Ruang dan Bangunan untuk perencanaan di bidang tata ruang serta pedoman dokumen *masterplan smart city*, *Masterplan* tersebut memiliki peran besar dalam membantu pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi dan arah serta prioritas pembangunan Kota Makassar, adapun tujuan *masterplan* tersebut yakni untuk menyusun *Masterplan Smart City* Kota Makassar yang sistematis, logis, kondisional dan realistis sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Makassar, sehingga kualitas hidup masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar lebih baik.

Hal tersebut dikatakan oleh Staf Bappeda terkait perencanaan, mengatakan bahwa :

“kami dari pihak Bappeda dalam mendukung pembangunan Kota Makassar melalui program *smart city* membuat perencanaan sebagai bentuk acuan dan pedoman dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2014-2019 yang menjadi pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tujuan, sasaran, dan program kerja terhadap pembangunan Kota Makassar termasuk program *smart city*” (Hasil wawancara RT tanggal 08 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan kebijakan *smart city* di Kota Makassar telah menjadi sasaran pembangunan dalam perda No. 5 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019 melalui Bappeda Kota Makassar, *smart city* menjadi target dan sasaran kinerja strategi setiap SKPD sehingga menjadi acuan dan pedoman dalam rangka mewujudkan pembangunan kota Makassar sebagai *smart city*.

Senada dengan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Staf Bidang Tata Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, menyebutkan :

“kita ketahui bahwa setiap daerah memiliki perencanaan, termasuk di Kota Makassar sendiri mempunyai perencanaan dalam penataan ruang dan wilayah, yaitu produk akhir dari perencanaan tata ruang dalam bentuk perda, dimana perda tersebut mengatur bagaimana penataan ruang Kota Makassar sesuai dengan peruntukannya untuk bangunan yang bersifat komersil, reklamasi dan lain sebagainya yang diatur dalam perda tersebut termasuk pengembangan kota pintar (*smart city*) ” (Hasil wawancara SY tanggal 19 Februari 2018)

Berdasarkan teori perencanaan yaitu produk dari proses perencanaan yang dimaksudkan untuk untuk mencapai sasaran dan tujuan yang akan dicapai maka peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara bahwa pemerintah Kota Makassar

membuat pedoman perencanaan yang legal, efisien dan terjangkau oleh pelaksana, pedoman tersebut mencakup peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No. 5 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2019 serta pedoman perencanaan yang bersifat operasional atau petunjuk teknis yaitu *masterplan smart city* Kota Makassar yang acuan dan pedoman rencana kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar (SKPD) sehingga pelaksanaan program smart city Kota Makassar dapat sejalan dengan visi-misi pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan *smart city* dalam rangka pembangunan perkotaan. Rencana strategis dari program *smart city* di Kota Makassar yang ingin dicapai meliputi : (1). Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, (2). Program pengembangan pos dan telekomunikasi, (3). Program pengembangan sistem informasi dan komunikasi, selain itu meletakkan visi dan misi pelaksanaan pemerintah, infrastruktur kota, lingkungan, keuangan, dan berbasis *smart city*.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dan bagaimana hubungan antar kegiatan tersebut dalam suatu bentuk struktur organisasi atau institusi.

Berdasarkan wawancara yang mendalam terhadap informan mengenai pengorganisasian dalam mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dan bagaimana hubungan antar kegiatan tersebut dalam suatu bentuk struktur

organisasi atau institusi. Berikut pemaparan yang dikatakan Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, menyampaikan bahwa :

“Adanya SK Walikota Makassar tentang Dewan *Smart City* melibatkan akademisi, komunitas, tenaga profesional dan setiap kepala SKPD. Setelah dewan *smart city* diterbitkan tim teknis pelaksanaan *smart city*. Tim teknis tersebut dari setiap Kepala SKPD kemudian diambil dari tenaga profesional pada kampus dan dimasukkan juga komunitas yang bergerak dibidang teknologi, tim pelaksana teknis dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan Kota Makassar menuju *Sombere’* dan *Smart City* serta hubungan antar tim pelaksana intens melakukan koordinasi agar terarah dalam memahami peran masing-masing” (Hasil wawancara DH tanggal 20 Februari 2018)

Hal tersebut di ungkapkan oleh Staf Bidang Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, menyatakan bahwa :

“Walikota Makassar membentuk tim pelaksana dengan membuat Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kota Makassar Menuju Makassar *Sombere’* dan *Smart City* dengan melibatkan seluruh SKPD. kami selaku anggota tim pelaksana tersebut terus melakukan komunikasi dengan *leading* Dinas Komunikasi Dan Informatika baik secara langsung maupun tidak langsung” (Hasil Wawancara SY tanggal 19 Februari 2018)

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa pengorganisasian yang dibentuk Pemerintah Kota Makassar dalam penyelenggaraan *smart city* melalui Surat Keputusan Walikota Makassar tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Sombere’* dan *Smart City*, terkait hubungan antar anggota yang masuk dalam struktur organisasi tersebut melakukan komunikasi dan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terarah dalam mengetahui peran dan tugas masing-masing.

Senada dengan diatas, Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Mengatakan bahwa :

“dalam mewujudkan tujuan Makassar sebagai *Smart City*, maka Walikota Makassar membentuk struktur organisasi dengan mengeluarkan SK tentang Dewan *Smart City* dan Pembentukan Tim Pelaksana *Sombere’* dan *Smart City*. Dimana kami selaku anggota terus berkomunikasi misalnya melalui media sosial (*WhatsApp*) agar mengetahui apa yang harus dikembangkan dari program *smart city* tersebut” (Hasil wawancara RT tanggal 08 Februari 2018)

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pengorganisasian dibentuk untuk memudahkan pembagian pelaksanaan program kerja sehingga dengan dikeluarkannya SK Walikota Makassar tentang Dewan *Smart City* dan Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Makassar. Pihak Bappeda selaku tim pelaksana program tersebut terus berkomunikasi melalui lewat media sosial (*WhatsApp*) agar dapat mengetahui apa yang akan dikembangkan dari program *smart city* tersebut.

Koordinasi dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota yang termasuk dalam struktur Tim Pelaksana *Sombere’* & *Smart City* tersebut, berikut kelompok kerja yaitu : (1). Bidang Perencanaan Dan Pengembangan *Smart City* Terdiri dari Kepala Seksi Bidang Aplikasi dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dosen Universitas Hasanuddin Makassar, Apindo Kota Makassar, Telkomsel dan Praktisi; (2). Bidang Pengelolaan Dan Pelaksanaan *Smart City* Terdiri yaitu Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan, Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup Makassar, Organda, Kepala UPTD War Room; dan (3). Bidang Monitoring dan Evaluasi *Smart City* terdiri atas Dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar,

Bank Sulselbar, Kepala Seksi Standarisasi, monitoring dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dinas Perdagangan.

Pernyataan tersebut dikatakan pula oleh Kepala Seksi Pelayanan Informasi Tata Ruang dan Bangunan Bidang Pengembangan Tata Ruang dan Bangunan, mengungkapkan bahwa :

“Terkait Pembentukan Pelaksana Tim Teknis *Smart City* tepatnya di Dinas Komunikasi dan Informatika disitulah punya *leading* yang mengkoordinir semua SKPD. Dinas Tata Ruang dan Bangunan hanya sebagai anggota yang masuk dalam pembentukan struktur organisasi tersebut yang sifatnya menunggu koordinasi apa yang akan dikembangkan dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melanjutkan dan men-*full up* dari program *smart city* tersebut. (wawancara AR tanggal 15 Februari 2018)

Berdasarkan teori pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dan bagaimana hubungan antar kegiatan tersebut dalam suatu bentuk struktur organisasi atau institusi, maka peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan smart city di Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar membentuk struktur organisasi dengan mengeluarkan SK Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Sombere’ dan Smart City Kota Makassar dan hubungan antar tim pelaksana tersebut terus melakukan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Setelah organisasi terbentuk maka untuk dapat bergerak diperlukan sumber daya manusia. Untuk itu dilakukan staffing, yaitu pengisian orang yang sesuai

untuk melaksanakan tugas dan fungsi bagian-bagian organisasi. Penempatan orang pada simpul atau bagian organisasi tersebut dibarengi dengan hak atau wewenang dan kewajiban masing-masing pejabatnya secara jelas. Berkaitan hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada informan terkait pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan masing-masing SKPD agar pekerjaan atau kegiatan bisa berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan. Berikut hasil wawancara Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, menyatakan bahwa :

“dilingkup bappeda sendiri terkait pelaksanaan program *smart city*, dalam menyusun dokumen perencanaan telah mengimplementasikan beberapa program bappeda berbasis elektronik diantaranya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi (SIM Monev). Program tersebut sebagai bentuk program kerja dari Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Makassar *Smart City* dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi” (Wawancara RT tanggal 08 Februari 2018)

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Informasi Tata Ruang dan Bangunan Bidang Pengembangan Tata Ruang dan Bangunan, menyatakan bahwa :

“Program *Sombere’ & Smart City* dari Bapak Walikota Makassar dalam hal penataan ruang, Dinas Tata Ruang dan Bangunan sudah memiliki anggaran dan akan memberikan pelayanan masyarakat terkait peruntukan lahan melalui sebuah *website* informasi. Sebuah teknologi canggih yang berada di lantai 10 Balaikota Makassar bernama *War Room*, dimana semua data SKPD akan terkumpul termasuk data dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan terkait pelayanan penataan ruang” (wawancara AR tanggal 15 Februari 2018)

Dari pemaparan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program kerja dalam mewujudkan Makassar *Smart City* mempunyai program kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD

contohnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar telah mengimplementasikan sejak tahun 2016 beberapa program diantaranya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi (SIM Monev), sedangkan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan mengimplementasikan program kerja dalam mendukung Makassar *Smart City* melalui *website* pelayanan informasi terkait penataan ruang di Kota Makassar.

Berikut pula ungkapan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, menyatakan bahwa :

“terkait program kerja yang dilaksanakan dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika salah satunya program kami yaitu layanan penyediaan *database open data online* dimana layanan tersebut berisikan informasi berupa data-data setiap SKPD baik itu laporan kerja serta arsip lainnya semua terkumpul dilayanan tersebut sebagai wujud dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mengawal dan mendukung program *smart city* Kota Makassar” (Hasil Wawancara DH tanggal 20 Februari 2018)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung program *smart city* Kota Makassar mempunyai program kerja salah satunya yaitu layanan penyediaan *database open data online* yang berisi informasi berupa data-data SKPD baik laporan kerja atau lainnya sebagai wujud menciptakan transparansi dalam keterbukaan informasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Bidang Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, menyatakan bahwa :

“dalam melaksanakan program Pemerintah Kota Makassar *Sombere’* dan *Smart City* dilingkup Dinas Tata Ruang dan Bangunan telah melaksanakan program kerja yakni *website* pelayanan informasi, didalam *website* tersebut segala informasi sudah ada mulai peruntukan lahan dan lainnya yang berkaitan penataan ruang di Kota Makassar” (Hasil Wawancara SY tanggal 19 Februari 2018)

Berdasarkan teori pelaksanaan yaitu pengisian orang yang sesuai untuk melaksanakan tugas dan fungsi bagian-bagian organisasi dan penempatan orang pada simpul atau bagian organisasi tersebut dibarengi dengan hak atau kewajiban dan kewenangan masing-masing pejabat dengan jelas, maka peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa Pelaksanaan untuk mewujudkan Makassar sebagai *Smart City* dibutuhkan sebuah program kerja maka dari itu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai program kerja sesuai dengan peran dan tugas masing-masing agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan contohnya program kerja Bappeda yaitu Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi (SIM Monev), program kerja dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan yaitu *Webiste* Pelayanan Informasi Tata Ruang, serta Program kerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu layanan penyediaan *database open data online* .

Tabel 1.7 Program kerja yang sudah terlaksana dan belum terlaksana yang mendukung penyelenggaraan *Sombere’ & Smart City* Kota Makassar, sebagai berikut :

No.	Program Sudah Terlaksana	Keterangan	Program Belum Terlaksana	Keterangan
1.	<i>Home Care</i>	Sudah Terlaksana sejak tahun 2015	1. <i>Water Front City</i>	Belum terlaksana karena masih terbatasnya anggaran yang ada dari APBD Kota Makassar
2.	<i>War Room</i>	Sudah Terlaksana sejak 2016	2. <i>Pete-Pete Smart</i>	Belum terlaksana/belum beroperasi karena masih ada yang perlu dibenahi terutama infrastruktur seperti <i>wi-fi</i> dan lain-lain
3.	<i>Smart Card</i>	Sudah terlaksana sejak tahun 2015	3. <i>Smart RTH</i>	Belum Terlaksana karena belum adanya persiapan yang matang
4.	BULO (Badan Usaha Lorong)	Sudah terlaksana awal tahun 2017	4. <i>E-Nassami</i>	Belum Terlaksana karena masih ada masalah teknis yang masih perlu

5.	Aplikasi Pacarita (Panen Cabe Lorong Kita)	Sudah berjalan sejak Agustus 2017	5.Sistem Informasi Managemen Aset Pertanahan (SIMATA)	dievaluasi Belum terlaksana masih perlu persiapan yang matang dan terbatasnya anggaran.
----	---	---	--	---

Berdasarkan tabel diatas bahwa program yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD dalam mendukung penyelenggaraan *Sombere'* dan *Smart City* sudah ada yang terlaksana dan ada pula yang belum terlaksana disebabkan oleh beberapa faktor misalnya program *water front city* belum terlaksana disebabkan karena terbatasnya dengan anggaran, program *pete'-pete' smart* belum terlaksana karena masih perlu yang harus dibenahi infrastrukturnya seperti *wi-fi*, dan lain-lainnya, *smart RTH* belum terlaksana dikarenakan SKPD belum siap, program *E-Nassami* belum terlaksana disebabkan oleh masih ada kendala teknis, serta program SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Aset Pertanahan) belum terlaksana dikarenakan masih belum ada kesiapan dari SKPD dan terbatas pada anggaran maka dari itu diharapkan semua jajaran SKPD dan unsur terkait lainnya untuk tetap lebih optimis menjalankan beberapa program untuk mewujudkan Makassar sebagai *smart city*.

4. Pengendalian (*Controlling*)

Kegiatan pengendalian mencakup pengendalian intern organisasi dan eksternal organisasi atau kegiatan yang terjadi di masyarakat. Pengendalian intern

organisasi dilakukan sesuai dengan budaya organisasi yang ada. Tujuan pengendalian organisasi adalah agar pelaksanaan tugas dan fungsi setiap komponen organisasi sesuai rencana dan program yang telah ditetapkan. Biasanya di dalam pelaksanaan rencana tidak bersifat kaku karena dalam kurun waktu kegiatan dapat dilakukan evaluasi dan revisi/penyesuaian rencana program dengan perkembangan kondisi yang terjadi. Berdasarkan wawancara mendalam terkait bagaimana pengendalian yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Seksi Aplikasi dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, menyatakan bahwa :

“melalui proses perencanaan dimasukkan dalam rencana strategis (renstra) kemudian di masukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) setelah itu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penetapan kerja untuk mewujudkan kota yang *smart* dan masing-masing kepala SKPD yang akan melakukan proses tersebut sesuai tugas dan fungsinya” (wawancara dengan JS tanggal 07 Februari 2018)

Senada dengan pernyataan diatas oleh Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, menyatakan bahwa :

“untuk menindaklanjuti apakah pelaksanaan program *smart city* berjalan sesuai rencana maka dilakukan pengendalian berupa pelaporan atau pemantauan dari pencapaian kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh setiap Kepala SKPD dikemudian dikontrol oleh Walikota Makassar guna penyempurnaan lebih lanjut” (Wawancara dengan RT tanggal 08 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan Makassar sebagai *smart city* maka tentunya harus dilakukan proses pengendalian (*controlling*) oleh setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) untuk mengetahui hasil kinerja setiap SKPD terkait dan kemudian akan dievaluasi kembali oleh Walikota Makassar untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Pernyataan tersebut juga dilakukan dikatakan oleh Kepala Seksi Informasi Tata Ruang dan Bangunan Bidang Pengembangan Tata Ruang dan Bangunan, menyebutkan bahwa :

“dinas tata ruang mempunyai salah satu bidang pengendalian tata ruang dan bangunan untuk mengatur dan mengontrol fungsi lahan dan bangunan apabila melanggar yang tidak sesuai dengan peruntukannya. terkait program *smart city* sendiri masing-masing kepala SKPD yang melakukan pelaporan atau pengawasan terhadap hasil program kerja yang telah dilakukan kemudian akan evaluasi oleh Walikota Makassar” (Wawancara dengan AR tanggal 15 Februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing mempunyai staf di bidang pengendalian (pengawasan) sesuai tugas dan fungsinya tetapi untuk pelaksanaan program *Smart City* sendiri setiap kepala SKPD yang melakukan proses pengendalian tersebut melalui pelaporan hasil pencapaian program kerja telah dilaksanakan dan selanjutnya akan evaluasi oleh Walikota Makassar agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berikut pula pernyataan dari Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, menyatakan bahwa :

“pengendalian dilakukan baik dalam bentuk monitoring atau lainnya dengan melihat hasil pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap SKPD yang kemudian akan di evaluasi oleh bapak Walikota Makassar untuk mengurangi penyimpangan yang terjadi dimasa yang akan datang” (Wawancara dengan DH tanggal 20 Februari 2018)

Berdasarkan teori pengendalian mencakup pengawasan, pelaporan atau pemantauan yang dilakukan oleh pimpinan serta dilakukan evaluasi apakah terjadi indikasi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa Pengendalian dalam pelaksanaan program *smart city* Kota Makassar dilakukan oleh setiap kepala SKPD tersebut baik dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan lainnya kemudian akan kembali ditindak lanjuti oleh Walikota Makassar untuk mengevaluasi apa yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan dapat tindak lanjuti.

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dan Mendukung Manajemen Perkotaan Berbasis *E-Government* Pada Program *Smart City* Di Kota Makassar

1. Faktor Pendukung

1. Komitmen Pemerintah Kota Makassar Mewujudkan Makassar Smart City

Makassar adalah salah satu kota yang terletak di kawasan timur Indonesia dan Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, kota sebagai pusat perkembangan perekonomian khususnya di kawasan timur Indonesia. Makassar merupakan daerah otonom yang selalu berupaya untuk berbenah dan memperbaiki diri dalam rangka mewujudkan Makassar yang dapat bersanding dengan berbagai kota yang ada di dunia atau dengan kata lain Makassar ingin mewujudkan dirinya sebagai *smart city*.

Perwujudan Makassar sebagai kota dunia bukanlah yang mudah untuk dilakukan, untuk mewujudkan Makassar sebagai *smart city* harus di dukung oleh konsistensi dan komitmen pemerintah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas kota Makassar dalam rangka mewujudkan kota sebagai smart city. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar menyatakan bahwa :

“Pemerintah kota Makassar telah berkomitmen untuk menjadikan *Sombere’* dan *Smart City* yang lebih baik, tidak hanya melalui teknologi tetapi juga karakter dan identitas lokal. *Sombere’& Smart City* akan menjadi panduan untuk menciptakan lingkungan berkelanjutan di Kota Makassar” (Wawancara DH tanggal 20 Februari 2018)

Senada yang diungkapkan oleh Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, menyebutkan bahwa :

“komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menggenjot pembangunan cukup tinggi, Walikota Makassar menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) bersama *Chief Executif Microsoft* dalam membangun dan mengintegrasikan Makassar dengan daerah lainnya dalam bentuk *smart city* atau kota pintar” (Wawancara RT tanggal 08 Februari 2018)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan komitmen pemerintah Kota Makassar sangat tinggi dalam mewujudkan Makassar sebagai *Smart City* dengan memanfaatkan teknologi tanpa harus meninggalkan identitas masyarakat lokal guna menciptakan lingkungan yang berkelanjutan di Kota Makassar.

Berikut juga dikatakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Informasi Tata Ruang dan Bangunan Bidang Pengembangan Tata Ruang dan Bangunan mengenai komitmen pemerintah Kota Makassar mewujudkan smart city, menyatakan bahwa :

“pada tahun 2014, Walikota Makassar berkeinginan untuk membangun Kota Makassar sebagai kota pintar atau *smart* guna tanpa melupakan jati diri atau budaya Makassar sehingga terciptanya *Sombere*’ dan *Smart City* sebagai solusi permasalahan yang ada di Kota Makassar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi” (Wawancara AR tanggal 15 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Komitmen pemerintah merupakan salah satu faktor yang mendukung untuk kemajuan Makassar sebagai *Smart City* karena tanpa adanya komitmen dari pemerintah maka untuk mewujudkan smart city akan sulit untuk di wujudkan.

2. Regulasi

Regulasi merupakan peraturan yang dibuat untuk mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Tujuan dibuat regulasi (aturan) adalah mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis. Untuk mampu mewujudkan visi-misi Kota Makassar sebagai *smart city* (kota pintar) maka pemerintah kota perlu membuat suatu aturan atau regulasi agar dapat mengatur proses rencana pembangunan Kota Makassar.

Seperti yang dikatakan oleh Staf Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Makassar, menyatakan bahwa :

“regulasi Pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan perkotaan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Makassar Tahun 2014-2019 yang dimana terdapat visi-misi pemerintah kota makassar menjadi patokan dalam pembangunan Kota Makassar

termasuk mewujudkan Kota Makassar sebagai *smart city*” (Hasil wawancara dengan RT tanggal 08 februari 2018)

Sama halnya yang dikatakan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, menyebutkan bahwa :

“landasan hukum pemerintah kota Makassar dalam menerapkan smart city di Kota Makassar telah diatur Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Makassar Tahun 2014-2019, perda tersebut memuat visi-misi dan program yang akan dilakukan selama 5 tahun kedepan pembangunan kota makassar termasuk *smart city* ini” (Hasil Wawancara DH tanggal 20 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari Staf Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar serta Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar , peneliti menyimpulkan bahwa regulasi pemerintah kota Makassar dalam mengatur pembangunan perkotaan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Makassar Tahun 2014-2019 termasuk program *smart city*.

Senada yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Informasi Tata Ruang dan Bangunan Bidang Pengembangan Tata Ruang dan Bangunan terkait regulasi pelaksanaan smart city, menyatakan bahwa :

“terkait regulasi pemerintah kota Makassar mengenai pelaksanaan *Sombere*’ dan *Smart City* telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Makassar Tahun 2014-2019 dalam rangka wujud visi-misi pemerintah kota Makassar untuk pembangunan perkotaan di kota Makassar” (Hasil wawancara AR tanggal 15 Februari 2018)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa regulasi sangat diperlukan dalam mengontrol dan mengendalikan agar dapat mencapai tujuan dan terkait pelaksanaan program *Smart City* telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Makassar Tahun 2014-2019 dalam rangka mewujudkan visi-misi pembangunan Kota Makassar.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan salah satu elemen yang bernilai penting dalam sistem manajemen pemerintahan. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang dapat menjadi pemimpin (*leader*) melalui aktivitas yang terus menerus sehingga dapat mempengaruhi yang dipimpinnya (*followers*) dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan memainkan peranan penting dalam organisasi. Berhasil tidaknya suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh sumber daya yang ada dalam organisasi, di samping itu faktor yang sangat berperan penting adalah faktor kepemimpinan. Peran utama kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berikut pernyataan yang dikatakan oleh Staf bidang Tata Ruang Dinas Tata Ruang Kota Makassar, menyatakan bahwa :

“kepemimpinan Bapak Walikota Makassar sudah sangat baik dilihat dari rencana beliau untuk mewujudkan kota pintar (*smart city*) dengan beberapa program inovasi yang telah dilaksanakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pelayanan publik dan lainnya kemajuannya mulai

terlihat dalam beberapa tahun terakhir ini” (Hasil wawancara SY tanggal 19 Februari 2018)

Senada dengan pernyataan selaku kepala seksi aplikasi dan telematika dinas komunikasi dan informatika kota Makassar, menyebutkan bahwa :

“Pemerintah Kota Makassar di era kepemimpinan Bapak Mohammad Ramdhan Pomanto telah menjadikan implementasi *smart city* sebagai salah satu menuju visi Makassar Kota Dunia, program *smart city* progresnya sudah mulai dirasakan masyarakat contohnya program inovasi yang dikeluarkan Bapak Walikota pada bidang kesehatan, pengelolaan sampah dan masa kepemimpinannya telah banyak mendapatkan berbagai penghargaan Walikota salah satunya penghargaan pemimpin inovatif” (Hasil wawancara JS tanggal 07 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kepemimpinan walikota Makassar saat ini sudah sangat baik dilihat dari beberapa program inovasi yang telah dikeluarkan salah satunya program smart city dan pada masa kepemimpinannya sudah mulai terlihat kemajuannya serta telah banyak mendapatkan berbagai penghargaan.

Senada pula dengan yang dikatakan oleh Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, menyatakan bahwa :

“faktor kepemimpinan sangat penting dalam menjalankan organisasi pemerintahan, pada masa kepemimpinan Bapak Walikota Makassar saat ini beliau bertekad mewujudkan program *smart city*, program ini akan meminimalisir korupsi dan meningkatkan pelayanan publik. Makassar akan menjadi kota pintar (*smart city*) walaupun belum maksimal tetapi kemajuannya sudah terasa”. (Hasil Wawancara RT tanggal 08 Februari 2018)

Berdasarkan keseluruhan dari hasil wawancara diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kepemimpinan menjadi faktor yang penting dalam menjalan roda organisasi, masa kepemimpinan bapak walikota Makassar saat ini dinilai sudah sangat baik dilihat dari tekad walikota Makassar untuk mewujudkan

visi Makassar sebagai smart city dengan berbagai program inovasi yang dikeluarkan yang kemajuannya mulai dirasakan masyarakat secara bertahap dan telah mendapatkan berbagai penghargaan beberapa tahun terakhir.

2. Faktor Penghambat

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi ataupun institusi. Selain itu, SDM juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu organisasi atau institusi. Pada hakikatnya, SDM adalah manusia yang dipekerjakan di suatu organisasi yang nantinya akan menjadi penggerak untuk bisa mencapai tujuan organisasi itu sendiri.

Sumber Daya Manusia dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu, SDM internal dan eksternal. SDM internal adalah pegawai pemerintahan, sedangkan eksternal adalah masyarakat daerah pada umumnya. Dalam kondisi saat ini pegawai pemerintah Kota Makassar belum memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara professional untuk menunjang tugas dan kewajiban kerjanya. Jenis dan kemampuan yang dituntut sangat beragam tergantung pada posisi dan tugasnya. Kendala yang di hadapi untuk mewujudkan Makassar *Smart City* adalah dari Masyarakat, Ketinggalan masyarakat dalam pemanfaatan TIK akan berdampak langsung pada suksesnya pelayanan masyarakat dengan menggunakan aplikasi

Teknologi informasi dan komunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Aplikasi dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, menyatakan bahwa :

“kendala SDM dari SKPD Kota Makassar yang dihadapi itu karena mereka belum siap untuk bergerak cepat dan masih kurangnya kemampuan SDM dalam hal memanfaatkan teknologi dan informasi sedangkan masyarakat kota Makassar yang masih awan dengan program *smart city* itu sendiri dan bingung apa yang akan dilakukan” (wawancara JS tanggal 07 Februari 2018)

Senada yang diungkapkan oleh Staf Bidang Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, menyatakan bahwa :

“proses peralihan dari yang dulunya manual sampai elektronik pasti ada tahapan-tahapannya, dari dinas tata ruang sendiri masih perlu pembenahan dalam artian tidak semua aparat mampu mengoperasikan atau menggunakan teknologi misalnya aparat yang sudah berumur 40 tahun keatas belum mampu bisa menggunakan teknologi serta dari masyarakat sendiri masih kurang paham program *smart city* ini” (Wawancara SY tanggal 19 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi Sumber Daya Manusia baik SKPD maupun masyarakat Kota Makassar dalam penyelenggaraan *smart city* ini adalah mereka belum siap bergerak cepat, kurangnya dalam memanfaatkan/mengoperasikan teknologi informasi serta kurangnya pemahaman masyarakat seperti apa program smart city dan bingung harus berkontribusi seperti apa hal ini mengakibatkan pelaksanaannya kurang maksimal.

Berikut pula dikatakan oleh Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, menyebutkan bahwa :

“SDM itu merupakan salah satu faktor sangat penting dalam melaksanakan program *smart city* di Kota Makassar akan tetapi masih terdapat kendala dari SDM sendiri baik itu pegawai dan masyarakat diantaranya masih minimnya pengetahuan serta kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi” (Wawancara RT tanggal 08 Februari 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun masyarakat masih memiliki permasalahan diantaranya kurangnya pemahaman/pengetahuan mengenai program *smart city* serta masih minimnya dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga pelaksanaan program *smart city* ini masih belum maksimal.

2. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi adalah sumber daya teknologi yang digunakan bersama yang menjadi *platform* bagi aplikasi sistem informasi tertentu di dalam suatu instansi. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan digunakan bersama di dalam sebuah instansi.

Infrastruktur memegang peranan penting dalam membuat *smart city*. karena *smart city* dibangun berdasarkan infrastruktur ICT seperti *Wi-fi* dan *hotspot*. Pembangunan infrastruktur ICT merupakan hal mendasar dalam melakukan pembangunan *smart city*. Pembangunan infrastruktur tergantung pada beberapa faktor yang terkait untuk kinerja dan ketersediannya.

Berikut pernyataan yang dikatakan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, menyebutkan bahwa :

“infrastruktur merupakan salah faktor yang sangat penting terhadap pelaksanaan *smart city* di Kota Makassar namun infrastruktur yang ada saat ini belum siap dan masih dalam proses membangun berupa *server*, *CCTV*, jaringan terkoneksi, sensor, *big data*, *cloud computing* dan lain sebagainya” (Wawancara DH tanggal 20 Februari 2018)

Senada yang diungkapkan oleh Staff Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, menyatakan bahwa :

“infrastruktur yang ada masih kurang memadai karena dalam pelaksanaan *smart city* memerlukan banyak infrastruktur seperti *internet*, jaringan *wi-fi*, dan infrastruktur lainnya, apabila sudah memadai maka program *smart city* di Kota Makassar bisa berjalan dengan baik” (Wawancara RT tanggal 08 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui infrastruktur yang saat ini belum memadai dan masih dalam proses membangun misalnya *server*, jaringan *wi-fi*, *big data* dan sebagainya sehingga belum siap dalam menjalankan program *smart city* di Kota Makassar dengan optimal.

Berikut pula yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Informasi Tata Ruang dan Bangunan Bidang Pengembangan Tata Ruang dan Bangunan, menyatakan bahwa :

“masih banyak kendala yang di hadapi dalam menerapkan konsep *smart city* di Kota Makassar salah satunya yaitu infrastruktur yang belum memadai misalnya sambungan jaringan *internet* yang cepat karena sistem serta perangkat lainnya yang menjadi salah satu pondasi *smart city* membutuhkan jaringan *internet* yang merata dan memadai untuk saling berkomunikasi dalam menjalankan fungsi perkotaan” (Wawancara AR tanggal 15 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan *smart city* akan tetapi infrastruktur di Kota Makassar saat ini belum memadai dan masih dalam proses membangun contohnya jaringan *internet*, *server*, dan masih banyak lagi sehingga pelaksanaan program *smart city* di Kota Makassar belum berjalan secara efektif dan optimal.

3. Anggaran

Sudah umum dibahas dan diketahui untuk melaksanakan program *smart city* membutuhkan anggaran besar. Anggaran untuk mengembangkan teknologi, membangun infrastruktur, membuat program, dan masih banyak lainnya. Anggaran yang dimiliki pemerintah kota di Indonesia terbilang terbatas sehingga proses pengembangan dan pelaksanaannya belum mencapai optimal. Berikut pernyataan dari Kepala Seksi Pelayanan Informasi Tata Ruang dan Bangunan Bidang Pengembangan Tata Ruang dan Bangunan mengenai anggaran, menyatakan bahwa :

“untuk mewujudkan kota pintar (*smart city*) diperlukan anggaran yang cukup besar karena banyak yang mesti dikeluarkan mulai dari penyediaan teknologi, infrastruktur dan pengembangan lainnya yang tidak murah sehingga pemerintah kota kesulitan melaksanakan program ini jika anggaran yang dimiliki tidak mencukupi” (Hasil wawancara AR tanggal 15 Februari 2018)

Sama halnya yang dikatakan oleh Kepala Bidang Aplikasi informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, menyebutkan bahwa :

“keterbatasan anggaran pemerintah kota Makassar menjadi kendala dihadapi saat ini dikarenakan masih memerlukan dana yang besar seperti penyediaan teknologi baru, pengembangan infrastruktur yang dinilai membutuhkan anggaran yang tidak sedikit” (Hasil wawancara DH tanggal 20 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa anggaran menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan program smart city dikarenakan untuk mewujudkan program tersebut membutuhkan dana yang cukup besar mulai dari menyediakan teknologi, infrastruktur dan masih banyak lainnya sehingga pemerintah kesulitan untuk mengaplikasikan program ini secara optimal.

Senada yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Aplikasi dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, menyatakan bahwa :

“selain faktor Sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi penghambat, anggaran juga sebagai faktor kendala disebabkan anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan program *smart city* cukup besar untuk ketersediaan teknologi canggih, pembangunan infrastruktur serta lainnya” (Hasil wawancara JS tanggal 07 Februari 2018)

Berdasarkan dari keseluruhan hasil wawancara, maka peneliti menyimpulkan bahwa anggaran merupakan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program smart city di Kota Makassar karena memerlukan anggaran yang cukup besar untuk menyediakan teknologi, membangun infrastruktur serta masih banyak lagi sehingga pemerintah kota Makassar masih sulit untuk mampu mengaplikasikan program ini secara efektif dan optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasasn pada bab sebelumnya terkait Manajemen Perkotaan Berbasis *E-Government* Pada Program *Smart City* Di Kota Makassar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara mengenai manajemen perkotaan berbasis *e-government* pada program *smart city* di Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa manajemen perkotaan pada program *smart city* Kota Makassar sudah sesuai, hal ini dapat dilihat indikator teori menurut George R. Terry proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam melaksanakan program *smart city* berjalan sesuai dengan visi-misi pembangunan Pemerintah Kota Makassar dalam rangka mewujudkan *smart city* di Kota Makassar
2. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Manajemen Perkotaan Berbasis *E-Government* Pada Program *Smart City* Di Kota Makassar, antara lain faktor pendukung adalah (1) komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Makassar *Smart City*, (2). Regulasi, dan (3). Kepemimpinan , sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah (1). Sumber Daya Manusia (SDM) (2). Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta (3). Anggaran

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulisan berikan dari hasil penelitian yang dilakukan selama penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perlunya meningkatkan koordinasi yang baik lagi antara pemerintah kota Makassar, jajaran SKPD serta unsur terkait lainnya sehingga pelaksanaan *smart city* Kota Makassar dapat berjalan sesuai visi-misi Kota Makassar.
2. Diharapkan lebih ditingkatkan bentuk monitoring atau pengawasan terhadap pelaksanaan program *smart city* di Kota Makassar agar berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
3. Hendak adanya infrastruktur yang memadai khususnya infrastruktur teknologi informasi sehingga dapat menjalankan program *smart city* Kota Makassar dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri. 2016. *Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Menunjang Terwujudnya Makassar Sebagai “Smart City”*. Jurnal Komunikasi KAREBA Vol.5 No. 2
- Angelia, Citra T. 2016. *Program-Program Smart City Bandung dan Surabaya*, Diakses pada tanggal 24 April 2017/(<http://trendsettercities.com/program-program-smart-city-bandung-dan-surabaya.html>)
- Daido, Zulkifli Andi. 2015. *Skripsi Analisis Program Smart City Di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar (<http://repository.unhas.ac.id>)
- Fathun, Muhamad Laode. 2016. *Paradiplomasi Menuju Kota Dunia : Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol.1 No. 1
- Fawahid, Ahmad. 2016. *Manajemen Perkotaan (Studi Kasus Penataan Drainase Di Kota Pekanbaru)*. JOMP FISIP Vol. 3 No. 2
- Fahmi, Khairul. 2009. *Teori Pengembangan Kawasan Kota*. Universitas Indonesia.pdf
- Gunawan, Winda. 2016. *Konsep Bandung Smart City*, Diakses pada tanggal 24 April 2017/(<http://windagunawan96.blogspot.co.id/2016/06/konsep-bandung-smart-city-a.html>)
- Jusman. 2017. *Inovasi Smart City dan Smart Governance*, Diakses pada tanggal 24 April 2017/(<http://jusmanskkel.blogspot.co.id>)
- Kabupung SF. 2012. *Teori Kota dan Citra Kota*. (<http://e.journal.uajy.ac.id>).pdf
- Manguluang, Putri Ade. 2016. *Skripsi Persiapan Kota Makassar Sebagai Smart City*, Universitas Hasanuddin Makassar
- Nurmandi, Achmad. 2006, *Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia*, Yogyakarta: Sinergi Publishing
- Nurmandi, Achmad. 2014, *Manajemen Perkotaan : Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*, Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- Nurwan, Novri. 2015. *Smart City di Kota Makassar*, Diakses pada tanggal 18 April 2017/ (<https://novrinurwan.blogspot.co.id/2015/03/smart-city-di-kota-makassar.html>)
- Purnomowati Wiwin, Ismini. 2014. *Konsep Smart City Dan Pengembangan Pariwisata Di Kota Malang*. Jurnal JIBEKA Vol. 8 No. 1
- Rianto, Budi dan Lestari, Tri, 2012. *Polri dan Aplikasi E-Government Dalam Pelayanan Publik*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara
- Rauf A. 2016. *Teori Smart City*, Universitas Islam Negeri Suska. Riau (<http://repository.uin.suska.ac.id>).pdf
- Sadyohutomo, Mulyono. 2009, *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Tenriawaru, Andi Fikri. 2015. *Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar*, Diakses pada tanggal 27 April 2017/ (<http://www.makassarkota.go.id/berita-pmi-kota-makassar-punya-markas-baru.html>)
- Utomo Wahyudi Eko Chandra, Hariadi Mochamad. 2016. *Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya Bagi Masyarakat Kota*. Jurnal Strategi dan Bisnis Vol. 4 No. 2
- Tim Teknis *Smart City Makassar*. 2017. *Analisis Strategis Smart City Kota Makassar.pdf*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengembangan *E-Government*

RIWAYAT HIDUP



MUH. SULFAN ARIES. Lahir Di Ujung Pandang Tanggal 3 April 1994, Anak Kelima Dari Pasangan Aries Karim Dan Nuraeni. Mulai Pendidikan Tahun 2002 di Sekolah Dasar Inpres Bontomanai Kota Makassar Dan Lulus Pada Tahun 2007. Kemudian Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satria Makassar dan Lulus Pada Tahun 2010. Kemudian Pada Yang Sama Kembali Melanjutkan Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Satria Makassar dan Lulus Pada Tahun 2013. Setelah Lulus Penulis Terdaftar Sebagai Mahasiswa Angkatan 2013 Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Makassar Pada Program Strata Satu (S1)